

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Profil Kota Probolinggo

Gambar 4. 1 Peta Kota Probolinggo



Sumber: Pemerintah Kota Probolinggo (2022b)

Kota Probolinggo termasuk bagian dari Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Probolinggo berlokasi pada kawasan yang

dikelilingi pegunungan, meliputi Gunung Meru (Semeru), Gunung Argopura, Gunung Bromo, Gunung Batok (gunung pasif), serta rangkaian pegunungan di kawasan Tengger. Kota Probolinggo juga berlokasi di wilayah garis pantura atau jalur utama pantai utara Jawa. Kota Probolinggo terletak di kawasan “Tapal Kuda”. Konteks geopolitik dan geososio-kultural masyarakat tapal kuda merupakan bagian dari masyarakat Pandalungan (Sapto, 2012).

Pandalungan merupakan ciri khas budaya Kota Probolinggo. Secara detail, ciri khas sosial terkait etnik dan budaya masyarakat Kota Probolinggo, meliputi: sosial budaya Kota Probolinggo merupakan penduduk yang berprofesi pada bidang pertanian (sebagai tani) dan penangkap ikan (nelayan) yang bertransisi dan tumbuh sebagai penduduk perkotaan (urbanis). Terdapat dua suku di Kota Probolinggo meliputi Suku asli Jawa dan Suku asli Madura. Keunikannya kedua suku ini melebur membentuk kekhasan tersendiri, yaitu menjadi bentuk masyarakat hibrida yang dikenal dengan masyarakat pandalungan (Fitria, 2021). Budaya sosial di Kota Probolinggo didominasi dan lekat dengan karakteristik budaya masyarakat gotong royong, budaya khas daerah pandalungan, dan kegiatan berasaskan Islam.

b. Sejarah Kota Probolinggo

Masa Kepemimpinan Prabu Radjasanagara atau dikenal dengan sebutan Sri Nata Hayam Wuruk dalam memerintah sebagai

Raja Agung Majapahit dengan urutan IV pada tahun 1350-1389, Probolinggo dinamai “Banger”. Nama Banger merupakan nama yang diambil dari aliran sungai utama yang melalui pusat wilayah. Arti kata Banger adalah busuk atau berbau tidak sedap. Selanjutnya wilayah Banger di bawah kepemimpinan Akuwu di Sukodono merupakan kawasan dukuh atau pedukuhan kecil. Nama Banger tertera pada tulisan Empu Prapanca sebagai Pujangga Kerajaan Majapahit dalam buku *Negarakertagama* 50. Pencatatan kawasan Banger oleh Pujangga Kerajaan Majapahit dikarenakan Banger merupakan kawasan yang masuk dalam Kerajaan Majapahit (Sapto, 2012).

Searah dengan politik negara atau politik penguasa yang tumbuh kembang pada masa Kerajaan Majapahit, model pemerintahan di Banger menghadapi transisi pembaruan atau perkembangan yang relevan dengan zaman yang berkembang (Pemerintah Kota Probolinggo, 2021) (DLH Kota Probolinggo, 2023). Awal wilayah banger sebagai bentuk dukuh kecil pada muara sungai Banger berubah dan tumbuh sebagai Pakuwon dengan pemimpin Akuwu serta masih dalam naungan kuasa kerajaan Majapahit. Banger yang berlokasi di wilayah perbatasan tepat antara wilayah Majapahit dan wilayah Blambangan. Sehingga wilayah Banger menjadi sasaran perebutan wilayah kekuasaan antar saudara oleh Bre Wirabumi atau Minakjinggo penguasa

Blambangan dengan Prabu Wikramawardhana penguasa Majapahit yang menciptakan peperangan dengan nama “Perang Paregreg”. Selanjutnya sejarah era kekuasaan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), memaksakan perjanjian pada Sunan Pakubuwono II di Mataram yang berisikan tentang daerah di Timur Pasuruan, termasuk Banger masuk dalam naungan VOC tepat di tahun 1743. Pada tahun 1746 VOC memberikan mandat pada Kyai Djojolelono guna memimpin dan memerintah sebagai Bupati Pertama di Banger, disertai gelar Tumenggung. Kyai Djojolelono merupakan keturunan dari Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen) yang menjabat sebagai Patih Pasuruan yang saat itu dibawah pimpinan Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati) sebagai Bupati Pasuruan. Desa Kebonsari Kulon sebagai Pusat Kabupaten. Pada masa kepemimpinan Kyai Djojolelono sempat terpengaruh politik adu domba oleh pihak VOC sebagai kompeni yang memanasi Kyai Djojolelono untuk bergerak menangkap dan melakukan pembunuhan pada 51 Panembahan Semeru, Patih Tengger, dan seluruh keturunan Untung Suropati yang menjadi penentang VOC. Bahkan Kyai Djojolelono berhasil membunuh Panembahan Semeru. Saat Kyai Djojolelono sadar atas kesalahan dan terpengaruh adu domba tersebut, Kyai Djojolelono berbalik arah ikut menjadi penentang VOC. Kyai Djojolelono pergi mengembara keluar dari istana dan melepas jabatan Bupati Banger di tahun

1768 sebagai tanda menentang VOC, (Pemerintah Kota Probolinggo, 2021) (DLH Kota Probolinggo, 2023).

VOC memberikan mandat pada Raden Tumenggung Djojonegoro sebagai Bupati Banger menggantikan Kyai Djojolelono. Raden Tumenggung Djojonegoro yang merupakan keturunan Raden Tumenggung Tjondronegoro yang menjabat sebagai Bupati Surabaya urutan ke 10. Raden Tumenggung Djojonegoro diberikan tempat tinggal Benteng Lama. Tumenggung Djojonegoro juga terpengaruh politik adu domba VOC dengan menangkap Kyai Djojolelono. Saat wafatnya Kyai Djojolelono dikuburkan di pesarean “Sentono”, pesarean ini dianggap keramat oleh masyarakat.

Kepemimpinan Tumenggung Djojonegoro membentuk dan membangun daerah Banger semakin makmur dan sejahtera, serta adanya penambahan penduduk. Bentuk pembangunan juga ditandai dengan pembangunan Masjid Jami’ sekitar Tahun 1770. Sehingga masyarakat senang dengan Kepemimpinan Tumenggung Djojonegoro, bahkan dikenal dengan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 juga nama Banger berubah menjadi “Probolinggo” oleh Tumenggung Djojonegoro. Makna dari kata probolinggo adalah probo berarti sinar atau cahaya dan linggo berarti tugu, badan, tanda peringatan, tongkat. Alasan perubahan nama adalah nama banger mengindikasikan nama yang tidak baik atau aroma busuk.

Maka perubahan nama Probolinggo memiliki arti sinar dengan bentuk tugu, gada, tongkat. Makna umumnya merupakan meteor atau bintang jatuh. Kanjeng Djimat yang wafat dikebumikan di makam di area Masjid Jami (Pemerintah Kota Probolinggo, 2021) (DLH Kota Probolinggo, 2023).

Menurut Sapto (2012) memaparkan bahwa terkait perkembangan administrasi Kota Probolinggo menjadi kota yang memiliki Sekolah Raja atau tempat untuk pendidikan bumi putera yang dikenal dengan *Hoofdenschool*. Sekolah raja merupakan sekolah yang di khususkan untuk pendidikan pembentuk tenaga administrasi pemerintahan kolonial. *Hoofdenschool* berkembang dan nama diganti *Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren* disingkat menjadi *OSVIA*. Pergantian nama tidak mengganti tujuan dari sekolah yakni sebagai tempat mendidik untuk Pendidikan Pegawai Bumiputera. Selanjutnya terdapat perubahan kembali menjadi sekolah menengah, disertai perubahan nama *Middelbare Opleidings School voor Inlandse Ambtenaren (MOSVIA)*. Perkembangan pendidikan di Kota Probolinggo juga ditandai dengan adanya Sekolah Dasar Negeri bagi bumiputera dengan penggunaan bahasa Melayu. Menggunakan bahasa Melayu perlu diterapkan guna lingua franca oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pendukung akselerasi perkembangan nasionalisme di golongan bumiputera.

Probolinggo ikut berkontribusi dalam lingkup sosial, politik, dan bidang lain di era revolusi. Pada masa itu Probolinggo membuka pelabuhan Probolinggo sebagai tempat pengiriman bantuan untuk Negara India karena kekuasaan tentara sekutu maupun Belanda menyebabkan pelabuhan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya ditutup. Keberhasilan pengiriman bantuan didukung dengan daerah Karesidenan Besuki yang berada sebagai gudang beras dan dijamin keamanan oleh Divisi Suropati. Selain itu, Probolinggo juga dikenal keberhasilan penerapan taktik dengan gerilya melawan kekuasaan Belanda di masa revolusi nasional dapat berlangsung intens, sampai kedaulatan diakui (Sapto, 2012).

c. Kondisi Geografis Kota Probolinggo

Secara Astronomi, Kota Probolinggo memiliki letak geografis Pada $7^{\circ} 43' 41''$ - $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan serta $113^{\circ} 10'$ - $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur. Kawasan Kota Probolinggo berupa daratan dengan luas 56,667 Kilometer persegi (Km^2). Kota Probolinggo terletak pada kawasan dengan ketinggian 4 Meter (M) sampai dengan 36 Meter (M) di atas permukaan laut. Pembatas kawasan Kota Probolinggo meliputi: Sebelah utara: berbatasan dengan Selat Madura; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo; Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih Kabupaten

Probolinggo; dan Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Kota Probolinggo merupakan kawasan pemberhentian atau singgah yang terhubung antara wilayah timur seperti Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi dengan wilayah barat seperti Pasuruan, Surabaya, dan Malang. Tata administrasi dalam pemerintah Kota Probolinggo dibagi dalam bentuk lima Kecamatan dan 29 Kelurahan meliputi Kecamatan Mayangan memuat lima Kelurahan; Kecamatan Kademangan memuat enam Kelurahan, Kecamatan Wonoasih memuat enam Kelurahan, Kecamatan Kedopok memuat enam Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran memuat enam Kelurahan. Terdapat enam sungai atau kali yang mengalir di wilayah Kota Probolinggo meliputi Kali Kedunggaleng, Kali Umbul, Kali Banger, Kali Legundi, Kali Kasbah, dan Kali Pancur. Panjang sungai atau kali rerata 3,80 Km. Sungai di Probolinggo terus mengalir setiap tahun, arah aliran arah selatan menuju utara relevan dengan bentuk lereng wilayah (Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2021a).

d. Kondisi Demografis

Pertumbuhan penduduk merupakan adanya perubahan populasi dalam periode waktu dan diperhitungkan menjadi perkembangan terkait kuantitatif individu pada populasi dengan

penggunaan "per waktu unit" guna melakukan pengukuran. Percepatan pertumbuhan penduduk mendukung pertumbuhan seluruh bidang kehidupan terdiri dari bidang sosial budaya, perekonomian, perpolitikan, dan lainnya. Penduduk Kota Probolinggo bertambah dan bertumbuh setiap tahun serta relatif dinamis melalui pemerataan kuantitas penduduk selaras kesetaraan pembangunan Kota Probolinggo. Pada Tahun 2021 mencatat penduduk Kota Probolinggo sejumlah 241.202 jiwa, dibanding jumlah penduduk tahun 2020 sejumlah 1.553 jiwa (Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2021). Penduduk Kota Probolinggo tersebar pada tengah kota sebelah utara yang menghubungkan pada Pelabuhan dan di sekitar sentral usaha atau ekonomi. Sedangkan sebelah selatan kota adalah wilayah perbatasan dengan wilayah agraris. Kuantitas penduduk di masing-masing Kecamatan memiliki keragaman, kuantitas paling tinggi berada pada Kecamatan Mayangan sejumlah 61.725 jiwa dan kuantitas paling rendah berada pada Kecamatan Wonoasih sejumlah 35.440 jiwa. Pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo menunjukkan kuantitas penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 119.577 jiwa, pada bentuk persentase sebesar 49,58% dari keseluruhan masyarakat Kota Probolinggo. Sedangkan kuantitas penduduk berjenis kelamin perempuan di Kota Probolinggo sejumlah 121.625 jiwa, dengan persentase 50,42%

dari keseluruhan masyarakat Kota Probolinggo. Kuantitas penduduk serta Laju Pertumbuhan Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Probolinggo pada Tahun 2010 dan Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah penduduk serta Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)		Distribusi Penduduk		Kepadatan Penduduk (Per-Km ²)		Rasio Jenis Kelamin	
	2010	2020	2010	2020	2010	2020	2010	2020	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kademangan	39.92	44.62	1.89	1.08	18.39	18.62	3.131	3.500	95.39	97.58
Kedopok	30.41	37.82	1.72	2.13	14.01	15.78	2.232	2.776	99.88	99.46
Wonoasih	31.69	35.21	1.29	1.03	14.60	14.69	2.886	3.207	97.87	100.4
Mayangan	60.45	61.77	0.79	0.21	27.85	25.77	6.980	7.133	96.48	98.06
Kanigaran	54.60	60.23	1.09	0,95	25.16	25.13	5.127	5.655	96.95	97.35
Kota Probolinggo	217.06	239.65	1.26	0.96	100.00	100.00	3.831	4.230	97.07	98.35

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021b)

Sesuai data Penduduk oleh Badan Pusat Statistik (2021), Kota Probolinggo memiliki penduduk di tahun 2010 sebanyak 217.06 jiwa. Sementara itu, pada Tahun 2020 penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020 sebanyak 239.65 jiwa. Selaras dengan data, menunjukkan kuantitas penduduk dengan jenis kelamin perempuan sangat banyak dibanding penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Kecamatan Mayangan sebagai kecamatan

dengan penduduk paling banyak dengan jumlah penduduk sejumlah 61.725 jiwa meliputi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 30.548 jiwa serta penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 31.177 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan kuantitas penduduk paling sedikit pada Kecamatan Wonoasih sejumlah 35.440 jiwa meliputi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 17.767 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 17.673 jiwa.

e. Kependudukan Kota Probolinggo

Pada data terbaru (Tahun 2020), sebaran penduduk Kota Probolinggo masih terkonsentrasi di Kecamatan Mayangan. Meskipun secara luas wilayah paling sempit dibanding kecamatan lain yaitu sebesar 15,27% dari luas total Kota Probolinggo. Kecamatan mayangan dihuni oleh 61 ribu penduduk Kota Probolinggo. Hal ini dapat dilihat kepadatan penduduk pada Kecamatan Mayangan Tahun 2020 sejumlah 7.133 per Km². Penyebaran penduduk di Kecamatan Mayangan di Tahun 2020 sebesar 25.77% (Badan Pusat Statistik, 2021b).

Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Kanigaran. Jumlah penduduk di Kecamatan Kanigaran sebesar 60 ribu jiwa penduduk Kota Probolinggo. Hal ini dapat dilihat kepadatan penduduk pada Kecamatan Kanigaran Tahun 2020 sejumlah 5.655 per Km². Penyebaran penduduk di Kecamatan

Kanigaran di Tahun 2020 sebesar 25.13% (Badan Pusat Statistik, 2021b).

Sebaran penduduk terkecil ada di Kecamatan Kedopok. Jumlah penduduk di Kecamatan Kedopok sebesar 37 ribu jiwa penduduk Kota Probolinggo. Hal ini dapat dilihat kepadatan penduduk di Kecamatan Kedopok Tahun 2020 sejumlah 2.776 per Km². Penyebaran penduduk di Kecamatan Kanigaran di Tahun 2020 sebesar 15.78% (Badan Pusat Statistik, 2021b).

f. Pendidikan Kota Probolinggo

Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan pendidikan dengan program wajib belajar lebih dari sembilan tahun yang. Keberadaan dan penyediaan fasilitas pendidikan meliputi sarana dan prasarana mendukung dalam peningkatan mutu pendidikan. Tahun 2021-2022, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo mencatat data pendidikan Kota Probolinggo, meliputi pada jenjang TK/RA terdapat 141 sekolah, 6.716 murid, dan 621 guru. Pada jenjang SD/MI terdapat 112 sekolah, 24.290 murid, dan 1.406 guru. SMP/MTS ada 47 sekolah, 13.559 murid dan 1.024 guru. SMA/SMK/MA ada 46 sekolah, 15.287 murid dan 1.001 guru. Sedangkan untuk perguruan tinggi ada 2 perguruan tinggi (Pemerintah Kota Probolinggo, 2022a).

g. Agama

Masyarakat Kota Probolinggo didominasi agama Islam 96,89%, sedangkan agama Kristen Katolik sebesar 1,16%, Protestan sebesar 1,43%, Budha sebesar 0,46 %, Hindu sebesar 0,05% dan lain-lain sebesar 0,01%. Data tersebut menunjukkan mayoritas penduduk dengan agama Islam (Badan Pusat Statistik, 2021a). Selaras dengan data dan informasi terkait Jawa Timur lekat dalam nilai Islam dan basis Nahdlatul Ulama terutama wilayah tapal kuda mulai dari Kota Surabaya sampai Kabupaten Banyuwangi. Terutama pada Kota Probolinggo terdapat pondok pesantren dengan jumlah yang relatif banyak dan keberadaan tokoh muslim meliputi kyai serta ustadz (Pemerintah Kota Probolinggo, 2021).

Lingkungan Kota Probolinggo menunjukkan harmonisasi antar umat beragama, ditunjukkan dengan sikap toleransi dan saling menghormati sesama umat beragama. Bahkan saat hari perayaan Tionghoa, Kota Probolinggo juga ikut serta berpartisipasi. Hiburan barongsai sudah menjadi bagian pesta rakyat di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo sudah menerima dan toleransi dengan agama Kong Hu Chu (Badan Pusat Statistik, 2021a) (Probolinggokota.go.id, 2020).

h. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja Kota Probolinggo tahun 2019 sejumlah 64.12% dari seluruh penduduk Kota Probolinggo. Pada tahun 2020 sejumlah 69.07% dari seluruh penduduk Kota Probolinggo. Sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 69.71% dari seluruh penduduk Kota Probolinggo (Badan Pusat Statistik, 2022b).

Tabel 4. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Probolinggo

Kota Probolinggo	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Probolinggo (%)		
	2019	2020	2021
Jumlah	64.12	69.07	69.71

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022b)

Pada tabel berikut menunjukkan setiap tahun ada kenaikan persentase. Terutama pada tahun 2019 menuju tahun 2020 ada kenaikan persentase. Sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 kenaikan tidak signifikan.

Tabel 4. 3 Statistik Angkatan Kerja di Kota Probolinggo

Statistik Angkatan Kerja	Statistik Angkatan Kerja Kota Probolinggo		
	2019	2020	2021
Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	183.252	185.205	187.172
1. Angkatan Kerja (1.a+1.b)	117.499	127.917	130.482
1.a Bekerja	112.502	119.345	121.939
1.b Pengangguran Terbuka	4.997	8.572	8.543
2. Bukan Angkatan Kerja (2.a+2.b+2.c)	65.753	57.288	56.690
2.a Sekolah	14.364	12.552	11.688
2.b Mengurus Rumah Tangga	44.998	39.359	39.225
2.c Lainnya	6.391	5.377	5.777
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,12	69,07	69,71
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95,75	93,30	93,45
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25	6,70	6,55

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022a)

i. Topografi

Kota Probolinggo memiliki kondisi topografi dengan ketinggian 0,50 mdpl. Kota Probolinggo terletak pada ketinggian kisaran 0 Meter hingga 50 Meter di atas permukaan laut (mdpl). Kota Probolinggo didominasi wilayah di ketinggian 0 hingga 24 Meter di atas permukaan laut (mdpl) sejumlah 56,22% wilayah. Menurut bentuk kewilayahan, kawasan utara Kota Probolinggo dibatasi oleh Selat Madura dengan ketinggian 0-12,5 mdpl serta wilayah selatan pada ketinggian 50 mdpl. Kota Probolinggo memiliki model kelerengan 0-2% dan tergolong kawasan relatif datar. Kondisi topografi Kota Probolinggo digolongkan pada ketinggian 0 mdpl sampai 25 mdpl; ketinggian 25 mdpl sampai 50 mdpl; ketinggian lebih dari 50 mdpl. Secara keseluruhan kawasan Kota Probolinggo lebih banyak pada ketinggian 0 sampai 25 mdpl dengan luas 3.156,55 mdpl. Kelerengan Kota Probolinggo dengan kondisi permukaan tanah tergolong datar pada kemiringan 0-8% (BPS Kota Probolinggo, 2018).

Tabel 4. 4 Luas Topografi Kota Probolinggo

No.	Kecamatan	Topografi			Total Hektar (Ha)
		0-25 mdpl	25-50 mdpl	>50 mdpl	
1	Kademangan	824,91	420,81	29,68	1.275,40
2	Wonoasih	164,51	933,59	0,00	1.098,10
3	Mayangan	865,50	0,00	0,00	865,50
4	Kanigaran	1.065,30	0,00	0,00	1.065,30
5	Kedopok	236,34	1.069,50	56,56	1.362,40
	Jumlah	3.156,55	2.423,91	86,24	5.666,70

Sumber: Peta Bakosurtanal BPS Kota Probolinggo (2018)

j. Hidrologi

Kota Probolinggo memiliki kondisi hidrologi tergolong pada kondisi sumber daya air dengan potensi air yang cukup melimpah, terlebih kondisi keenam sungai atau kali memiliki aliran air yang memadai. Sungai atau kali terpanjang di Kota Probolinggo merupakan Kali Legundi dengan panjang 7,42 km. Selanjutnya, sungai atau kali terpendek di Kota Probolinggo merupakan Kali Kasbah dengan panjang 2,04 km. Kota Probolinggo memanfaatkan air sungai sebagai keperluan bidang pertanian dan perikanan. Alasannya adalah sungai Kota Probolinggo tidak dicemari limbah industri besar. Tetapi sungai masih mudah dicemari oleh limbah atau sampah dari rumah tangga. Sudah ada pembersihan dari hulu dan hilir serta secara berkala. Bahkan Pemerintah Kota Probolinggo telah bergerak untukantisipasi adanya pembuangan sampah ke sungai (Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2021a). Aliran sungai dengan panjang aliran, meliputi:

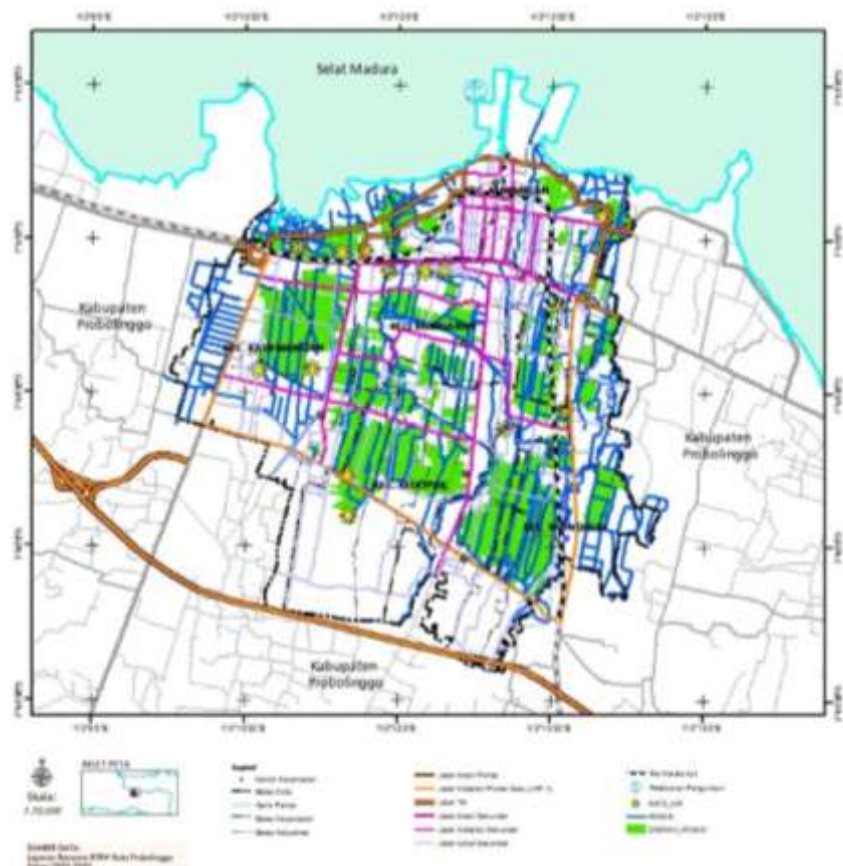
Tabel 4. 5 Rata-rata Panjang Aliran Sungai Kota Probolinggo

No.	Nama Sungai	Panjang Aliran Sungai (Km)
1	Kali Kedunggaleng	5,75
2	Kali Umbul	5,14
3	Kali Banger	2,87
4	Kali Legundi	7,42
5	Kali Kasbah	2,04
6	Kali Pancur	4,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo (2018)

Data di atas didukung dengan gambar peta hidrologi atau peta aliran sungai di Kota Probolinggo, sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Peta Hidrologi Kota Probolinggo



Sumber: (Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2021a)

k. Klimatologi

Presipitasi di Kota Probolinggo hari basah merupakan kondisi 1 milimeter dengan curah hujan berbentuk cair. Menurut data Weather Spark (2022) memaparkan bahwa musim hujan terjadi 5,4 bulan, dari pertengahan November hingga akhir April, persentase sejumlah 34% turun hujan. Bulan Februari menjadi hari paling basah di Kota Probolinggo, curah hujan rerata 17,8 hari. Musim kemarau terjadi

selama 6,6 bulan, dari akhir April sampai pertengahan November. Bulan dengan hari basah sangat minim di Kota Probolinggo pada bulan Agustus, rerata 1,4 hari. Kota Probolinggo memiliki iklim tropis rerata curah hujan paling maksimum pada Bulan Januari sejumlah 411 mm serta hari hujan dalam kurun waktu lama ada pada bulan Januari terjadi 13 hari. Curah hujan minimum ada pada bulan Agustus dengan suhu terukur 26°C hingga mencapai 32°C.

Tabel 4. 6 Jumlah Curah Hujan Menurut Stasiun Hujan dan Bulan di Kota Probolinggo 2019-2020

Bulan (Ke)	Jumlah Curah Hujan Menurut Stasiun Hujan dan Bulan Di Kota Probolinggo							
	Triwung Kidul		Kademangan		Pakistaji		Probolinggo	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	310	417	240	212	336	214	262	262
2	191	458	66	397	99	391	117	117
3	207	141	90	111	172	150	148	148
4	109	110	150	128	293	148	122	122
5	26	313	-	264	-	170	-	-
6	-	-	-	-	-	1	-	-
7	-	19	-	19	-	20	-	-
8	-	58	-	44	-	12	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	21	-	28	-	49	-	-
11	-	256	-	248	-	139	-	-
12	-	144	-	98	-	182	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo (2021)

Data didukung dengan peta klimatologi Kota Probolinggo. Guna mempermudah melihat persebaran terjadinya hujan yang paling rendah dan paling intens. Gambaran ini di peta kan sesuai dengan pantau 4 titik stasiun pengamatan hujan.

tahun terjadi lebih dari empat bulan, tepatnya awal Bulan Juni hingga akhir Bulan Oktober pada kecepatan angin rerata di atas 10,9 km/jam. Bulan paling berangin pada kurun waktu satu tahun di Kota Probolinggo terdapat pada Bulan Agustus pada kecepatan angin rerata 14,1 km/jam (Weather Spark, 2022).

Sedangkan di Kota Probolinggo, masa angin lebih tenang dalam kurun waktu satu tahun terjadi lebih dari tujuh bulan pada akhir Bulan Oktober sampai awal Bulan Juni. Bulan dengan kondisi angin tidak terlalu kuat pada satu tahun terdapat pada Bulan Maret pada kecepatan angin rerata 8,0 km/jam. Arah angin satu jam rerata yang didominasi keragaman setiap tahun. Angin lebih intens berhembus dari arah timur selama dua sampai tiga bulan, tepatnya terjadi akhir Bulan Maret sampai pertengahan Bulan Juni. Persentase paling tinggi pada 60% di pertengahan Bulan Mei. Angin intens berhembus dari selatan selama lima sampai enam bulan, tepatnya pertengahan Bulan Juni sampai pertengahan Bulan Desember. Persentase paling tinggi pada 67% di akhir Bulan Agustus. Angin intens berhembus dari arah barat selama tiga bulan, tepat pertengahan Bulan Desember sampai akhir Bulan Maret pada dengan persentase sebesar 53% pada di awal Bulan Januari (Weather Spark, 2022).

2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat “Satpol PP”. Satuan Polisi Pamong Praja menjadi alat atau perangkat Pemerintah Daerah pada pemeliharaan wilayah agar tentram dan tertib serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan organisasi resmi dan memiliki struktur kinerja dengan Peraturan Daerah atau Perda. Satpol PP memiliki posisi wewenang pada lingkup provinsi serta lingkup kabupaten dan kota. Pada tingkat provinsi, Satpol PP berada dibawah pimpinan kepala yang dinaungi serta bertanggung jawab pada Gubernur melalui sekretaris daerah atau sekda. Sementara itu pada tingkat kabupaten maupun kota, Satpol PP berada dibawah pimpinan kepala yang dinaungi serta bertanggung jawab pada bupati maupun walikota melalui sekretaris daerah atau sekda.

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP juga berada di Kota Probolinggo terselenggara sesuai dengan wewenang perangkat Pemerintah Daerah terkait pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP dinaungi oleh pimpinan Walikota Probolinggo melalui sekretaris daerah.

a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja tercetus pertama kali di Yogyakarta tepat tanggal 3 Maret 1950. Satpol PP menerapkan semboyan *Praja Wibawa*, guna memfasilitasi bagian tugas pemerintah daerah. Sebelum berbentuk Satpol PP, pasca memproklamkan

kemerdekaan Indonesia dibentuk Detasemen Polisi yang bertugas dalam menjaga keamanan Kapanewon di Yogyakarta yang dijalankan atas Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta guna penjagaans wilayah agar tentram dan tertib (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2023a). Pada tanggal 10 November 1948 terjadi perubahan lembaga dengan Detasemen Polisi Pamong Praja. Khusus pada wilayah Jawa dan Madura, tanggal 3 Maret 1950 menjadi peresmian pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga setiap 3 Maret diputuskan menjadi Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk selalu diperingati (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2023a).

Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja untuk area luar Jawa dan Madura yang didukung pihak petinggi militer atau angkatan perang tepat di tahun 1960. Perubahan nama terjadi lagi di Tahun 1962 menjadi Kesatuan Pagar Baya guna menekankan perbedaan dari kesatuan polisi Republik Indonesia. Hal ini tertuang pada UU Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tetap tahun 1963 terjadi perubahan nama dengan Kesatuan Pagar Praja. Tetapi saat adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tepatnya di Pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa Satpol PP menjadi perangkat wilayah dengan pelaksanaan tugas secara dekonsentrasi. Pembaruan regulasi pada

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan diperbaiki dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berisikan Polisi Pamong Praja merupakan alat atau perangkat pemerintah daerah dengan tugas utama penegakkan regulasi daerah, penyelenggaraan ketertiban publik dan ketenteraman masyarakat pada penerapan tugas terdesentralisasi.

b. Lambang dan Arti Lambang

Gambar 4. 5 Lambang Satuan Polisi Pamong Praja



Lambang dan Arti Lambang, seperti berikut (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2023a):

- 1) Tameng atau Perisai, menjadi simbol Satuan Polisi Pamong Praja yang dengan fungsi sebagai mengayomi masyarakat dengan pelaksanaan fungsi agar tercipta Ketertiban Umum sektor Kewilayahan.

- 2) Kusuma Bangsa menjadi simbol Satuan Polisi Pamong Praja guna sebagai bentuk teladan pada masyarakat khusus dalam penegakkan disiplin nasional.
- 3) Padi berjumlah 45 butir menjadi simbol Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan tugas kewajiban dilandasi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45.
- 4) Bunga Kapas (7 tangkai) menjadi simbol Satuan Polisi Pamong Praja terkait sikap perilaku serta ucapan dengan dipedomani Sumpah Prasetya Korpri.
- 5) Praja Wibawa menjadi simbol Satuan Polisi Pamong Praja wajib berperan terkait pengayoman dan penegakkan bangsa.
- 6) Kemudi Kapal menjadi simbol Satuan Polisi Pamong Praja dengan mendukung dan memberikan bantuan Kepala Daerah terkait penentuan arah serta tujuan mengabdikan pada Bangsa dan Negara.
- 7) Angka 1950 menjadi simbol kelahiran atau tercetusnya Satuan Polisi Pamong Praja.
- 8) Biru menjadi simbol Negara Kesatuan merupakan Negara Bahari.
- 9) Jingga menjadi simbol sebagai Pengaman, Penegak dan Pengayom.
- 10) Merah menjadi simbol sikap berani.
- 11) Putih menjadi simbol suci.

c. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang memiliki kewenangan tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disertai Pengawasan Perlindungan Masyarakat yang termasuk dalam elemen penegak bangsa (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2023b). Alamat Satpol PP Kota Probolinggo berada di Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 23, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. 67211. Telepon: (0335)420266. Website:<http://satpolpp.probolinggokota.go.id>.

d. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

Visi dan Misi Satpol Kota Probolinggo, (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2023c):

1) Visi

Terwujudnya Kota Probolinggo yang kondusif melalui Penegak Perda, Penyelenggaraan Tibumtranmas.

2) Misi

a) Mewujudkan ketentram dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat

b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

1) Tugas

Tugas utama Satpol PP Kota Probolinggo merupakan bantuan pada kepala daerah terkait penegakkan perda atau peraturan daerah, regulasi kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disertai perlindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2023b).

2) Fungsi

Pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Probolinggo berfungsi, meliputi (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2023b):

- a) Menyusun program dan melaksanakan tegaknya perda, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat;
- b) Melaksanakan kebijakan menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah;
- c) Melaksanakan kebijakan dalam menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat daerah;
- d) Melaksanakan kebijakan melindungi masyarakat;

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian, pengembangan, pengelolaan keuangan, rencana program, umum dan kepegawaian. Susunan organisasi sekretariat, terdiri atas (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, n.d.):

- 1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, n.d.):
 - a) Melakukan penghimpunan dan telaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan serta pedoman atau ketentuan lainnya berhubungan pada Subbagian Tata Usaha
 - b) Penyusunan rancangan program dan aktivitas disertai melaksanakan tugas Subbagian Tata Usaha
 - c) Pembagian tugas, petunjuk, dan evaluasi hasil kinerja bawahan dalam bertugas
 - d) Penyelenggaraan administrasi umum seperti tata usaha, tata pelaksanaan, kepustakaan, serta tata kearsipan Satpol PP
 - e) Melaksanakan administrasi kepegawaian Satpol PP
 - f) Koordinasi dalam melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja serta standar kompetensi pegawai Satpol PP
 - g) Penyusunan standar operasional prosedur atau SOP kerja Satpol PP

- h) Penyusunan rancangan kebutuhan dan melaksanakan pengadaan serta memelihara sarana dan prasarana kerja Satpol PP
 - i) Pelaksanaan inventarisasi, distribusi, menyimpan, merawat, serta usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja Satpol PP
 - j) Pelaksanaan aktivitas humas dan protokol serta layanan penerimaan tamu Satpol PP
 - k) Penyelenggaraan mengurus perjalanan dinas, kebersihan, keamanan kantor, dan layanan kerumahtanggaan lain
 - l) Pelaksanaan pemantauan serta evaluasi dalam menyelenggarakan program dan aktivitas Subbagian Tata Usaha
 - m) Penyusunan laporan dalam menyelenggarakan program dan aktivitas serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
 - n) Pelaksanaan tugas satuan lain yang diberikan oleh Sekretaris selaras dengan tugas dan fungsi.
- 2) Subbagian Program, memiliki tugas (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, n.d.):
- a) Penghimpunan dan telaah regulasi perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman atau ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;

- b) Penyusunan rancangan program dan aktivitas disertai penyelenggaraan pada Satpol PP
- c) Pembagian tugas, petunjuk dan evaluasi hasil kerja bawahan dalam bertugas
- d) Koordinasi menyusun rancangan dan penyelenggaraan program serta aktivitas Satpol PP
- e) Penyusunan rancangan kinerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
- f) Penghimpunan, dokumentasi dan penyajian data informasi yang berhubungan dengan menyelenggarakan layanan sektor publik, program serta aktivitas pada *Website* Satpol PP
- g) Koordinasi melaksanakan susunan Standar Pelayanan Publik atau SPP
- h) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM
- i) Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satpol PP
- j) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan laporan penyelenggaraan program serta aktivitas Satpol PP
- k) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program serta aktivitas Subbagian Program
- l) Penyusunan laporan penyelenggaraan program dan aktivitas serta realisasi anggaran Subbagian Program

dan pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris relevan dengan tugas dan fungsi.

3) Bidang Penegakkan Peraturan (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, n.d.):

a) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

Tugas dari Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan:

- Penghimpunan dan telaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan serta pedoman atau ketentuan lainnya berhubungan dengan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Penyusunan rancangan program dan aktivitas serta penyelenggaraan pada Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Pembagian tugas, petunjuk dan evaluasi hasil kerja bawahan dalam bertugas;
- Persiapan bahan perumusan kebijakan berhubungan dengan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Persiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait pada penyelenggaraan program serta aktivitas Seksi Operasi dan Pengendalian;

- Pelaksanaan kebijakan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Pelaksanaan pengamanan terhadap Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah serta aset-aset vital milik daerah;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program serta aktivitas Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Penyusunan pelaporan dalam melaksanakan program dan aktivitas serta realisasi anggaran Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah relevan dengan tugas dan fungsi

b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Tugas dari Seksi Penyelidikan dan Penyidikan:

- Penghimpunan dan telaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan serta pedoman atau ketentuan lain berhubungan dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Penyusunan rancangan program dan aktivitas serta penyelenggaraan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

- Pembagian tugas, petunjuk dan evaluasi hasil kerja bawahan dalam bertugas;
- Persiapan bahan perumusan kebijakan berhubungan dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Persiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan program serta aktivitas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

c) Seksi Operasi dan Pengendalian

Tugas dari Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan:

- Penghimpunan dan telaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman atau ketentuan lain berhubungan dengan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Penyusunan rancangan program dan aktivitas serta penyelenggaraan pada Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Pembagian tugas, petunjuk dan evaluasi hasil kerja bawahan dalam bertugas;

- Persiapan bahan perumusan kebijakan berhubungan dengan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Persiapan bahan koordinasi bersama instansi terkait dalam penyelenggaraan program dan aktivitas Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Pelaksanaan kebijakan dalam menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- Pelaksanaan dalam keamanan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah serta aset-aset vital milik daerah;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program serta aktivitas Seksi Operasi dan Pengendalian;
- Penyusunan laporan penyelenggaraan program dan aktivitas serta realisasi anggaran Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah relevan dengan tugas dan fungsi.

4) Bidang Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, n.d.):

a) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- Penghimpunan dan telaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman atau ketentuan lain berhubungan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyusunan rancangan program dan aktivitas serta penyelenggaraan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pembagian tugas, petunjuk dan evaluasi hasil kerja bawahan dalam bertugas;
- Persiapan bahan perumusan kebijakan berhubungan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Persiapan bahan koordinasi bersama instansi terkait dalam penyelenggaraan program dan aktivitas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum Daerah;

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program serta aktivitas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyusunan pelaporan penyelenggaraan program dan aktivitas serta realisasi anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia relevan dengan tugas dan fungsi.

b) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tugas Seksi Pengembangan Kapasitas SDM:

- Penghimpunan dan telaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman atau ketentuan lain berhubungan dengan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- Penyusunan rancangan program dan aktivitas serta penyelenggaraan pada Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- Pembagian tugas, petunjuk dan evaluasi hasil kerja bawahan dalam bertugas;

- Persiapan bahan perumusan kebijakan berhubungan dengan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- Persiapan bahan koordinasi bersama instansi terkait dalam penyelenggaraan program dan aktivitas Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- Pelaksanaan susunan analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya serta kapasitas personil;
- Pelaksanaan aktivitas dalam mengembangkan sumber daya dan kapasitas personil;
- Pelaksanaan aktivitas kesamaptaaan personil;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program serta aktivitas Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;
- Penyusunan laporan penyelenggaraan program dan aktivitas serta realisasi anggaran Seksi Pengembangan Kapasitas SDM; dan
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM relevan dengan tugas dan fungsi.

5) Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran
(Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, n.d.):

a) Seksi Perlindungan Masyarakat

Tugas Seksi Perlindungan Masyarakat

- Penyusunan rancangan program dan aktivitas serta penyelenggaraan pada Seksi Perlindungan Masyarakat
- Pembagian tugas, petunjuk dan evaluasi hasil kerja bawahan dalam penyelenggaraan tugas
- Persiapan bahan perumusan kebijakan berhubungan dengan Seksi Perlindungan Masyarakat
- Persiapan bahan koordinasi bersama instansi terkait pada penyelenggaraan program dan aktivitas Seksi Perlindungan Masyarakat
- Persiapan bahan kebutuhan pelatihan serta mengembangkan personil perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi personil perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan dalam memberdayakan personil perlindungan masyarakat

- Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Korps Musik
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program serta aktivitas Seksi Perlindungan Masyarakat
- Penyusunan pelaporan penyelenggaraan program dan aktivitas serta realisasi anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran relevan dengan tugas dan fungsi

b) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Tugas Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

- Penghimpunan dan telaah peraturan perundang-undangan, petunjuk, penyelenggaraan dan pedoman atau ketentuan lain berhubungan dengan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- Penyusunan rancangan program dan aktivitas serta penyelenggaraan pada Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- Pembagian tugas, petunjuk dan evaluasi hasil kerja bawahan pada penyelenggaraan tugas

- Persiapan bahan perumusan kebijakan berhubungan dengan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- Persiapan bahan koordinasi bersama instansi terkait penyelenggaraan program dan aktivitas Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Pelaksanaan pembinaan dan kapasitas serta pengendalian sumber daya manusia pemadam kebakaran
- Pelaksanaan dalam membangun dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran
- Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan bahan berbahaya dan bahan beracun dalam daerah
- Pelaksanaan memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan aktivitas seksi pemadam kebakaran
- Penyusunan laporan program dan aktivitas serta realisasi anggaran Seksi Pemadam Kebakaran

- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran relevan dengan tugas dan fungsi.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Analisis data merupakan kegiatan yang memiliki kegunaan koneksi antara variabel. Analisis data menjadi aktivitas pasca penghimpunan data responden maupun sumber data lain. Penyebaran kuesioner pada 100 masyarakat yang menghubungi dan memanfaatkan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Probolinggo. Keseluruhan data sejumlah 100 kuesioner kembali serta dapat diolah, untuk ditindaklanjuti dengan pengujian serta dianalisa. Jumlah kuesioner yang kembali, sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Probolinggo, pada bulan Desember Tahun 2022 hingga Bulan Februari Tahun 2023. Responden dalam riset ini merupakan masyarakat yang pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo sebanyak 100 responden. Data responden didapatkan melalui arsip pelaporan dan pengaduan dalam layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai kantor pusat layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.

Tabel 4. 7 Tingkat Pengembalian Kuesioner

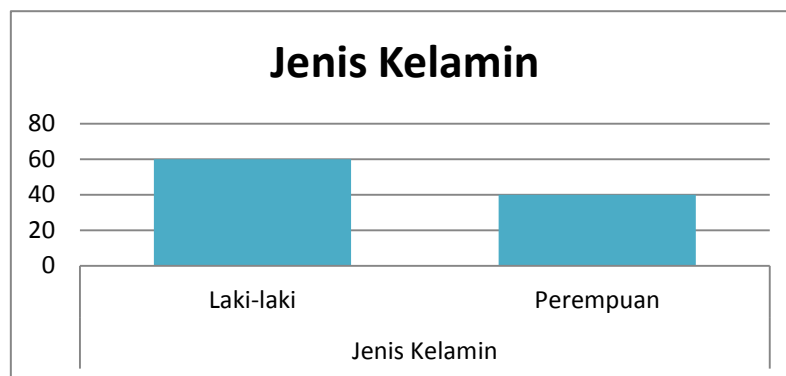
Kriteria	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	100	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	0	0%
Kuesioner sesuai memenuhi syarat	100	100%

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Data di atas menunjukkan data kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 item; 100 item kuesioner dikembalikan secara lengkap atau tidak ada kuesioner yang tertinggal atau tidak kembali; 100 kuesioner kembali dengan kelengkapan data atau tidak ada kuesioner yang tidak lengkap; dan 100 kuesioner kembali dengan memenuhi syarat. Pada intinya, kuesioner sebanyak 100 buah kembali dengan memenuhi syarat dan lengkap sebanyak 100 buah. 100% data yang disebar dan kembali dengan lengkap tanpa ada kesalahan data atau kehilangan data. Sehingga data yang didapatkan dari kuesioner dapat dilanjutkan dalam perhitungan dan pengujian. Selanjutnya dideskripsikan data-data yang diperoleh dari 100 responden.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar histogram 4.7 di bawah ini:



Gambar 4. 7 Histogram Distribusi Frekuensi Karakteristik Masyarakat Pengguna Layanan menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar histogram di atas menunjukkan bahwa frekuensi karakteristik responden dengan dasar berjenis kelamin. Jenis kelamin dibagi dalam 2 jenis, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Jenis kelamin masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo tertinggi terdapat interval berjenis kelamin laki-laki dengan 60 jiwa. Sedangkan jenis kelamin masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo frekuensi lebih rendah adalah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 40 jiwa.

Tabel 4. 8 Tabel Urutan Jenis Kelamin Responden

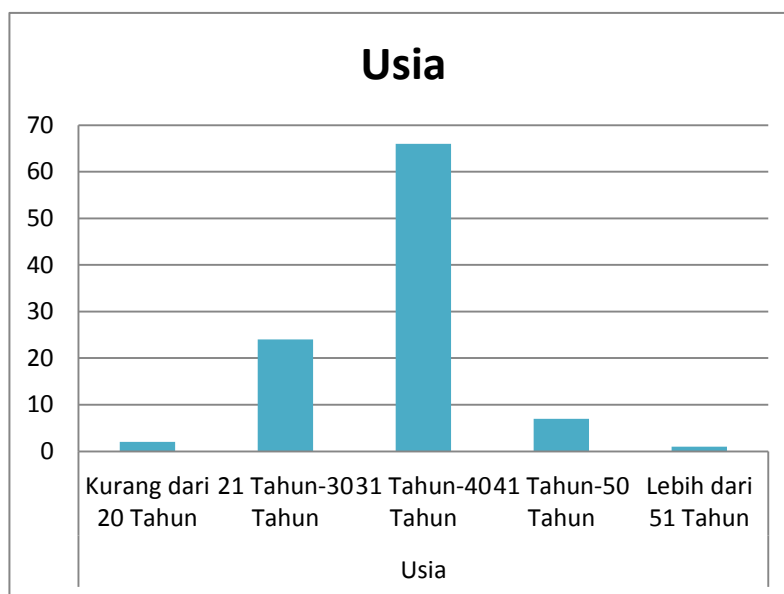
Jenis Kelamin	Jumlah Responden
Laki-laki	60
Perempuan	40
Jumlah	100

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Pada data semakin jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kuantitas responden laki-laki dengan responden perempuan. Perbedaan tersebut tidak signifikan, hanya ada selisih sebanyak 10 orang. Artinya jumlah responden berjenis laki-laki lebih besar sejumlah 60 responden dari 100 responden. Sedangkan jumlah responden perempuan sejumlah 40 responden dari 100 responden. Pengguna pelayanan tersebut menunjukkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan jenis kelamin.

b. Karakteristik responden berdasarkan Usia

Distribusi karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar histogram 4.8 di bawah ini:



Gambar 4. 8 Histogram Distribusi Frekuensi Karakteristik Masyarakat Pengguna Layanan menurut Usia

Berdasarkan gambar histogram di atas menunjukkan bahwa frekuensi karakteristik responden dengan dasar usia masyarakat. Usia dibagi menjadi lima jenis, yaitu usia kurang dari 20 Tahun; 21

Tahun hingga 30 Tahun; 31 Tahun hingga 40 Tahun; 41 Tahun hingga 50 Tahun; dan diatas 51 Tahun. Usia masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo Kota Probolinggo tertinggi terdapat pada interval umur 31 Tahun sampai 40 Tahun dengan jumlah 66 jiwa. Sedangkan usia masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo Kota Probolinggo frekuensi terendah ada di interval usia lebih dari/sama dengan 51 Tahun dengan jumlah 1 jiwa. Banyak sedikitnya frekuensi disebabkan karena aktifnya penggunaan alat komunikasi.

Tabel 4. 9 Tabel Urutan Usia Responden

Usia	Jumlah Responden
Kurang dari 20 Tahun	2
21 Tahun – 30 Tahun	24
31 Tahun – 40 Tahun	66
41 Tahun – 50 Tahun	7
Lebih dari 51 Tahun	1
Jumlah	100

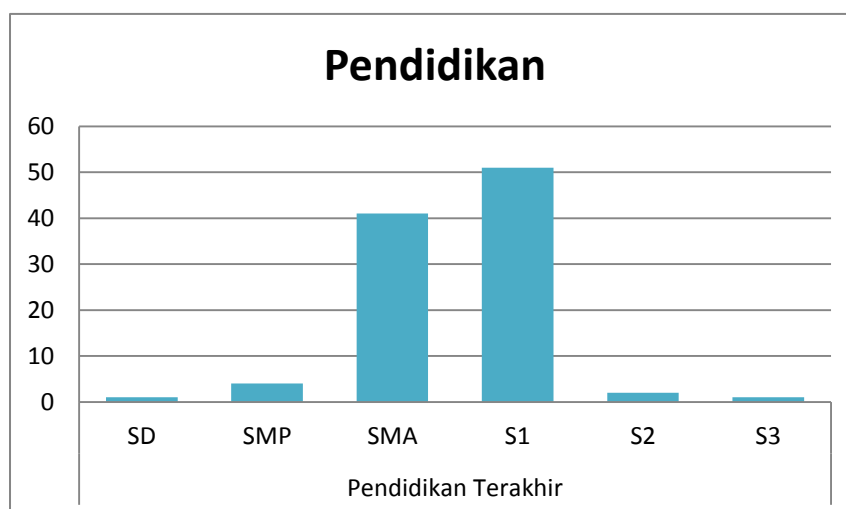
Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Pada data, urutan usia masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo Kota Probolinggo dari yang tertinggi sampai terendah adalah peringkat pertama, usia 31 Tahun-40 Tahun dengan jumlah 66

orang. Peringkat kedua, usia 21 Tahun-30 Tahun dengan jumlah 24 orang. Peringkat ketiga, usia 41 Tahun-50 Tahun dengan jumlah 7 orang. Peringkat keempat, usia kurang dari 20 Tahun dengan jumlah 2 jiwa. Peringkat kelima, usia lebih dari 51 Tahun dengan 1 jiwa.

c. Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan

Distribusi karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada gambar histogram 4.9 di bawah ini:



Gambar 4. 9 Histogram Distribusi Frekuensi Karakteristik Masyarakat Pengguna Layanan menurut Pendidikan

Pada gambar histogram menunjukkan bahwa frekuensi karakteristik responden dengan dasar jenis pendidikan terakhir masyarakat. Jenis pendidikan dibagi menjadi enam jenis, yaitu pendidikan Sekolah Dasar (SD); pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

pendidikan Sarjana (S1); pendidikan Magister (S2); dan pendidikan Doktor (S3). Jenis pendidikan terakhir masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo frekuensi tertinggi terdapat pada jenis pendidikan S1 (Strata Satu atau Sarjana) dengan jumlah 51 orang. Sedangkan jenis pendidikan terakhir masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo frekuensi terendah terdapat pada jenis pendidikan SD (Sekolah Dasar) dengan jumlah 1 orang dan jenis pendidikan S3 (Doktor) dengan jumlah 1 orang.

Tabel 4. 10 Tabel Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden
Pendidikan SD	1
Pendidikan SMP	4
Pendidikan SMA	41
Pendidikan S1	51
Pendidikan S2	2
Pendidikan S3	1
Jumlah	100

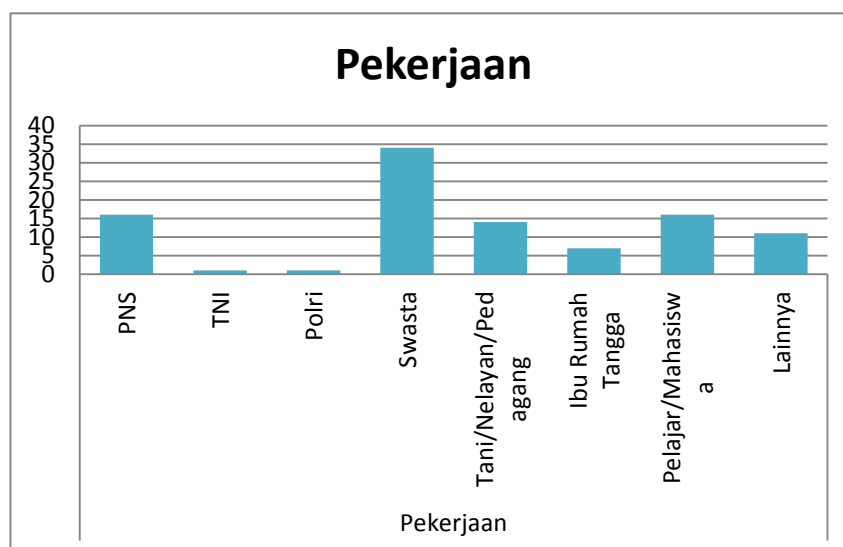
Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Pada data, urutan pendidikan terakhir masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo Kota Probolinggo dari yang tertinggi sampai

terendah adalah peringkat pertama, pendidikan S1 dengan jumlah 51 jiwa. Peringkat kedua, pendidikan SMA dengan jumlah 44 orang. Peringkat ketiga, pendidikan SMP dengan jumlah 4 jiwa. Peringkat keempat, pendidikan S2 dengan jumlah 2 jiwa. Peringkat kelima, khusus peringkat kelima terdapat dua kategori yaitu pendidikan SD dan pendidikan S3. Alasannya dua kategori tersebut memiliki kesamaan jumlah yaitu 1 jiwa.

d. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

Distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada gambar histogram 4.10 di bawah ini:



Gambar 4. 10 Histogram Distribusi Frekuensi Karakteristik Masyarakat Pengguna Layanan menurut Pekerjaan

Pada gambar histogram menunjukkan bahwa frekuensi karakteristik responden dengan dasar jenis pekerjaan masyarakat. Jenis pekerjaan dibagi menjadi delapan jenis, yaitu PNS; TNI; Polri; Swasta; Petani/Nelayan/Pedagang; Ibu Rumah Tangga; Pelajar/Mahasiswa; dan lainnya. Jenis pekerjaan masyarakat yang

menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo frekuensi tertinggi di jenis pekerjaan Swasta sejumlah 34 jiwa. Sedangkan jenis pekerjaan masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo frekuensi paling rendah ada di jenis pekerjaan seperti TNI dan Polri sejumlah 1 jiwa.

Tabel 4. 11 Tabel Urutan Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah Responden
PNS	16
TNI	1
Polri	1
Swasta	34
Petani/Nelayan/Pedagang	14
Ibu Rumah Tangga	7
Pelajar/Mahasiswa	16
Lainnya	11

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

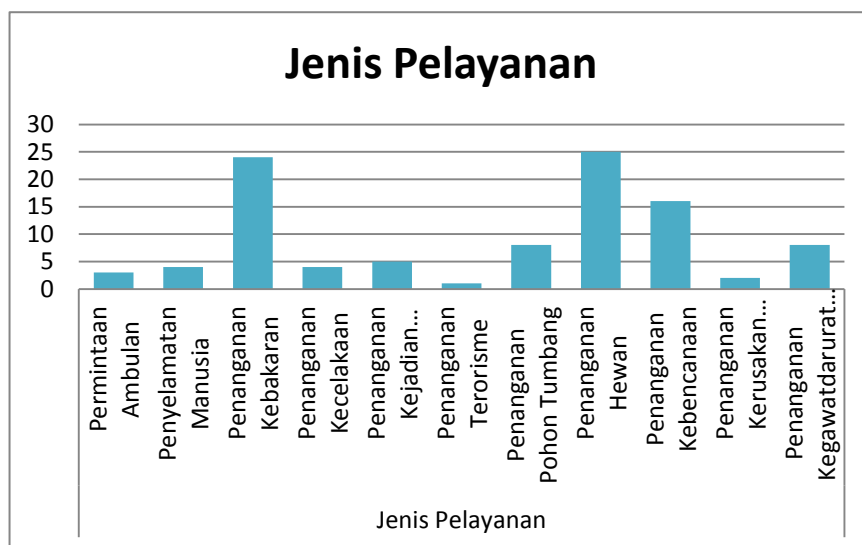
Pada data, urutan pekerjaan masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo Kota Probolinggo dari yang tertinggi sampai terendah adalah peringkat pertama, Swasta dengan jumlah 34 orang. Peringkat kedua, pada peringkat kedua terdapat dua kategori yaitu PNS dan Pelajar/Mahasiswa yang memiliki kesamaan jumlah responden sebesar 16 jiwa. Peringkat ketiga, Tani/Nelayan/Dagang dengan jumlah 14 jiwa. Peringkat keempat, pekerjaan lain yang tidak tertera pada pilihan dengan jumlah 11 jiwa. Peringkat kelima, ibu rumah tangga dengan jumlah 7 jiwa. Peringkat keenam, pada

peringkat keenam terdapat dua kategori yaitu TNI dan Polri yang memiliki kesamaan jumlah responden sebesar 1 jiwa.

Masyarakat yang dapat menggunakan pelayanan ini adalah seluruh masyarakat. Tidak hanya untuk kepentingan pemerintah atau instansi, tapi seluruh masyarakat dapat melakukan panggilan pada Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Probolinggo. tidak hanya bagi layanan di sektor pemerintahan, bisnis, dan pihak tertentu, masyarakat umum yang membutuhkan dapat menghubungi Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Probolinggo.

e. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Pelayanan

Distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis pelayanan dapat dilihat pada gambar histogram 4.11 di bawah ini:



Gambar 4. 11 Histogram Distribusi Frekuensi Karakteristik Masyarakat Pengguna Layanan menurut Jenis Pelayanan

Pada gambar histogram menunjukkan bahwa frekuensi karakteristik responden dengan dasar jenis Pelayanan. 11 jenis pelayanan, yaitu Permintaan Ambulan; Penyelamatan Manusia; Penanganan Kebakaran; Penanganan Kecelakaan; Penanganan Kriminal; Penanganan Terorisme; Penanganan Pohon Tumbang; Penanganan Hewan; Penanganan Kebencanaan; Penanganan Kerusakan Konstruksi; dan Penanganan Kegawatdaruratan lainnya. Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo frekuensi tertinggi pada penanganan hewan dengan jumlah 25 orang. Sedangkan pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo frekuensi terendah pada penanganan teroris dengan jumlah 1 orang.

Tabel 4. 12 Tabel Pelayanan yang Diterima Responden

Jenis Pelayanan	Jumlah Responden
Permintaan Ambulan	3
Penyelamatan Manusia	4
Penanganan Kebakaran	24
Penanganan Kecelakaan	4
Penanganan Kejadian Kriminal	5
Penanganan Kejadian Terorisme	1
Penanganan Pohon Tumbang	8
Penanganan Hewan	25
Penanganan Kebencanaan	16
Penanganan Kerusakan Konstruksi	2
Penanganan Kegawatdaruratan	8
Jumlah	100

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Pada data, urutan jenis pelayanan yang diterima masyarakat yang menjadi pengguna layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo Kota Probolinggo dari yang tertinggi sampai terendah adalah peringkat pertama, jenis pelayanan penanganan hewan dengan jumlah 25 orang. Peringkat kedua, jenis pelayanan penanganan kebakaran dengan jumlah 24 orang. Peringkat ketiga, penanganan kebencanaan dengan jumlah 16 orang. Peringkat keempat, khusus peringkat keempat terdapat 2 kategori yaitu penanganan pohon tumbang dan penanganan kegawatdaruratan lainnya yang memiliki kesamaan jumlah responden sebesar 8 orang. Peringkat kelima, penanganan kejadian kriminal dengan jumlah 5 orang. Peringkat keenam, pada peringkat keenam terdapat dua kategori yaitu penanganan penyelamatan manusia dan penanganan kecelakaan yang memiliki kesamaan jumlah responden sebesar 4 orang. Peringkat ketujuh, permintaan ambulans dengan jumlah 3 orang. Peringkat kedelapan, penanganan kerusakan konstruksi dengan jumlah 2 orang. Peringkat kesembilan, penanganan teroris dengan jumlah 1 orang.

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Sesuai data terhimpun, jawaban kuesioner telah diolah dan direkap serta ditindaklanjuti dengan analisis guna mendapatkan deskriptif pada setiap variabel. Nilai yang diberikan responden berdasarkan pada kriteria meliputi: Skor nilai dari 1 hingga 10; Skor penilaian terendah merupakan 1; dan Skor penilaian tertinggi merupakan 10.

a. Analisis Deskriptif Variabel Efektivitas

Tanggapan dari 100 responden terkait efektivitas implementasi pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo diukur melalui tiga pertanyaan dari tiga item efektivitas meliputi rasionalitas teknis, pencapaian tujuan, dan nilai penanganan layanan dalam penanganan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Probolinggo. Pertanyaan terdiri dari Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara efektif melalui rasionalitas teknis; Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara efektif dalam pencapaian tujuan; dan Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara efektif melalui nilai penanganan layanan.

Tabel 4. 13 Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Efektivitas Implementasi Pelayanan

Pernyataan		Kriteria Jawaban										Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pelayanan Layanan NTPD 112 sesuai dengan rasionalitas teknis	F	-	-	-	-	-	-	18	50	23	9	100	8,23
	Skor	-	-	-	-	-	-	126	400	207	90	823	
Pelayanan Layanan NTPD 112 sesuai dengan pencapaian tujuan	F	-	-	-	-	-	-	8	54	32	6	100	8,36
	Skor	-	-	-	-	-	-	56	432	288	60	836	
Pelayanan Layanan NTPD 112 sesuai dengan nilai penanganan layanan	F	-	-	-	-	-	-	1	39	36	24	100	8,83
	Skor	-	-	-	-	-	-	7	312	324	240	883	
Jumlah												25,42	

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

b. Analisis Deskriptif Variabel Efisiensi

Tanggapan dari 100 responden terkait efisiensi implementasi pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo diukur melalui tiga pertanyaan dari tiga item efisiensi meliputi rasionalitas ekonomi, pengoptimalan sumber daya, dan pengoptimalan sarana prasarana dalam penanganan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Probolinggo. Pertanyaan terdiri dari Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara efisien melalui rasionalitas ekonomi; Pelayanan NTPD 112 Kota

Probolinggo secara efisien dalam pengoptimalan sumber daya; dan Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara efisien melalui pengoptimalan sarana prasarana.

Tabel 4. 14 Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Efisiensi Implementasi Pelayanan

Pernyataan		Kriteria Jawaban										Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
NTPD 112 melalui rasionalitas ekonomi	F	-	-	-	-	-	-	14	34	28	24	100	8,62
	Skor	-	-	-	-	-	-	98	272	252	240	862	
NTPD 112 melalui pengoptimalan sumber daya	F	-	-	-	-	-	3	28	40	24	5	100	8
	Skor	-	-	-	-	-	18	196	320	216	50	800	
NTPD 112 melalui pengoptimalan sarana prasarana	F	-	-	-	-	-	-	-	25	55	20	100	8,95
	Skor	-	-	-	-	-	-	-	200	495	200	895	
Jumlah													25,57

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

c. Analisis Deskriptif Variabel Kecukupan

Tanggapan 100 responden terkait kecukupan implementasi pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo diukur melalui tiga pertanyaan dari tiga item kecukupan meliputi kepuasan masyarakat, kecukupan kinerja aparatur, dan kecukupan nilai pelayanan dalam penanganan NTPD 112 di Kota Probolinggo. Pertanyaan terdiri dari Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara kecukupan melalui memberikan kepuasan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kondisi darurat; Pelayanan

NTPD 112 Kota Probolinggo secara kecukupan melalui kinerja aparatur dalam penanganan kondisi darurat; dan Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara kecukupan melalui kinerja aparatur dalam penanganan kondisi darurat.

Tabel 4. 15 Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Kecukupan Implementasi Pelayanan

Pernyataan		Kriteria Jawaban										Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
NTPD 112 memberikan kepuasan pada masyarakat	F	-	-	-	-	-	-	7	53	26	14	100	8,47
	Skor	-	-	-	-	-	-	49	424	234	140	847	
NTPD 112 kecukupan kinerja aparatur	F	-	-	-	-	-	-	13	53	26	8	100	8,29
	Skor	-	-	-	-	-	-	91	424	234	80	829	
NTPD 112 kecukupan nilai penanganan kondisi darurat	F	-	-	-	-	-	-	2	20	47	31	100	9,07
	Skor	-	-	-	-	-	-	14	160	423	310	907	
Jumlah													25,83

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

d. Analisis Deskriptif Variabel Pemerataan

Tanggapan dari 100 responden terkait pemerataan implementasi pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo diukur melalui tiga pertanyaan dari tiga item pemerataan meliputi rasionalitas legal, rasionalitas sosial, dan orientasi keadilan dalam penanganan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Probolinggo. Pertanyaan terdiri dari Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara pemerataan dengan rasionalitas legal; Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara pemerataan

dengan rasionalitas sosial; dan Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara pemerataan dengan orientasi keadilan dalam distribusi layanan.

Tabel 4. 16 Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Pemerataan Implementasi Pelayanan

Pernyataan			Kriteria Jawaban										Jumlah	Nilai
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pelayanan NTPD 112 dengan rasionalitas legal	F		-	-	-	-	-	2	16	45	28	9	100	8,26
	Skor		-	-	-	-	-	12	112	360	252	90	826	
Pelayanan NTPD 112 dengan rasionalitas sosial	F		-	-	-	-	-	1	7	49	36	7	100	8,41
	Skor		-	-	-	-	-	6	49	392	324	70	841	
Pelayanan NTPD 112 dengan keadilan sosial	F		-	-	-	-	-	-	-	14	53	33	100	9,19
	Skor		-	-	-	-	-	-	-	112	477	330	919	
Jumlah													25,86	

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

e. Analisis Deskriptif Variabel Responsivitas

Tanggapan dari 100 responden terkait responsivitas implementasi pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo diukur melalui tiga pertanyaan dari tiga item responsivitas meliputi respon aparatur, kemauan aparatur, dan kesiapan aparatur dalam penanganan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Probolinggo. Pertanyaan terdiri dari Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara responsif dengan respon aparatur;

Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara responsif dengan kemauan aparatur dalam layanan; dan Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara responsif dengan kesiapan aparatur dalam layanan.

Tabel 4. 17 Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Pemerataan Responsivitas Pelayanan

Pernyataan		Kriteria Jawaban										Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pelayanan NTPD 112 dengan respon aparatur	F	-	-	-	-	-	-	6	49	35	10	100	8,49
	Skor	-	-	-	-	-	-	42	392	315	100	849	
Pelayanan NTPD 112 dengan kemauan aparatur	F	-	-	-	-	-	1	8	51	32	8	100	8,38
	Skor	-	-	-	-	-	6	56	408	288	80	838	
Pelayanan NTPD 112 dengan kesiapan aparatur	F	-	-	-	-	-	-	3	11	49	37	100	9,20
	Skor	-	-	-	-	-	-	21	88	441	370	920	
Jumlah													26,07

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

f. Analisis Deskriptif Variabel Ketepatan

Tanggapan dari 100 responden terkait ketepatan implementasi pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo diukur melalui tiga pertanyaan dari tiga item ketepatan meliputi tepat nilai, tepat waktu, dan tepat tindakan dalam penanganan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Probolinggo. Pertanyaan terdiri dari Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara tepat dengan tepat nilai dalam layanan kondisi darurat;

Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara tepat dengan tepat waktu dalam layanan kondisi darurat; dan Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo secara tepat dengan tepat tindakan dalam layanan kondisi darurat.

Tabel 4. 18 Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Ketepatan Responsivitas Pelayanan

Pernyataan		Kriteria Jawaban										Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
NTPD 112 tepat nilai penanganan	F	-	-	-	-	-	4	22	45	17	12	100	8,11
	Skor	-	-	-	-	-	24	154	360	153	120	811	
NTPD 112 tepat waktu penanganan	F	-	-	-	-	-	-	3	39	43	15	100	8,7
	Skor	-	-	-	-	-	-	21	312	387	150	870	
NTPD 112 tepat tindakan dalam penanganan	F	-	-	-	-	-	-	-	10	47	43	100	9,33
	Skor	-	-	-	-	-	-	-	80	423	430	933	
Jumlah												26,14	

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Teknik mengolah data dengan menerapkan metode SEM dengan basis PLS membutuhkan dua tahap guna menilai fit model pada model riset (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Salah satunya merupakan analisis Outer Model. Analisis Outer model diterapkan guna melakukan uji ukur untuk kelayakan dalam pengukuran yang absah. Terdapat indikator pada analisis outer model, meliputi *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

1) Uji Validitas Konvergen

Convergent validity pada model ukur dengan model reflektif indikator dinilai selaras dengan korelasi antar item skor maupun komponen skor pada *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif tergolong besar jika terkorelasi diatas 0,70 pada konstruk yang ingin diukur. Pada riset ini tahapan pertama pada pengembangan skala ukur nilai *loading* 0,5 hingga 0,60 tergolong cukup (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Sehingga *Convergent validity* dicantumkan nilai *Loading Factor* per-item setiap variabel.

Tabel 4. 19 Nilai Convergent Validity

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	Status
Efektivitas	Efektivitas 1	0,787	Valid
	Efektivitas 2	0,528	Valid
	Efektivitas 3	0,801	Valid
Efisiensi	Efisiensi 1	0,862	Valid
	Efisiensi 2	0,784	Valid
	Efisiensi 3	0,636	Valid
Kecukupan	Kecukupan 1	0,704	Valid
	Kecukupan 2	0,894	Valid
	Kecukupan 3	0,834	Valid
Pemerataan	Pemerataan 1	0,793	Valid
	Pemerataan 2	0,757	Valid
	Pemerataan 3	0,713	Valid
Responsivitas	Responsivitas 1	0,615	Valid
	Responsivitas 2	0,662	Valid
	Responsivitas 3	0,848	Valid
Ketepatan	Ketepatan 1	0,887	Valid
	Ketepatan 2	0,514	Valid
	Ketepatan 3	0,579	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Sesuai pada data menunjukkan nilai *outer model* atau korelasi setiap konstruk variabel sudah memenuhi *convergent validity* karena indikator yang memiliki nilai *loading factor* sebesar 0,50. Pada setiap indikator variabel Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan > 0,5. Maka indikator tergolong valid sebagai pengukur variabel latennya.

2) Uji Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan melibatkan pedoman terkait ukuran struktural yang memuat perbedaan tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi. Terdapat 2 tahapan dalam evaluasi validitas diskriminan yakni melalui nilai *cross-loadings* dan membandingkan konstruksi dengan nilai *average variance extracted* (AVE) yang diekstraksi. Kriteria untuk *cross loadings* adalah bahwa setiap matrik yang mengukur batasannya lebih relevan dengan konstruksinya daripada konstruk lainnya (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

Tabel 4. 20 Hasil uji Validitas Diskriminan

Variabel	$\sqrt{\text{AVE}}$	Status
Efektivitas	0,716	Valid
Efisiensi	0,766	Valid
Kecukupan	0,814	Valid
Pemerataan	0,755	Valid
Responsivitas	0,716	Valid
Ketepatan	0,680	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas memaparkan nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ pada variabel Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan memiliki nilai $\sqrt{\text{AVE}} > 0,5$. Maka variabel digolongkan valid.

3) *Composite Reliability*

Metode lain dalam melakukan penilaian *discriminant validity* dengan melakukan perbandingan nilai *square root of Average Variance Extracted* (AVE) pada masing-masing konstruk dengan korelasi setiap konstruk lain pada model. Kriteria validitas dan reliabilitas melalui nilai reliabilitas pada konstruk dan nilai AVE setiap konstruk. Konstruk tergolong dalam reliabilitas tinggi dengan memiliki nilai 0,70 dan AVE lebih dari 0,50. Konstruk digolongkan reliabel jika nilai *composite reliability* lebih dari 0.7 dan nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0.6.

Tabel 4. 21 Hasil uji Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Status
Efektivitas	0,754	0,669	Reliabel
Efisiensi	0,808	0,696	Reliabel
Kecukupan	0,854	0,745	Reliabel
Pemerataan	0,799	0,681	Reliabel
Responsivitas	0,755	0,633	Reliabel
Ketepatan	0,708	0,650	Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Evaluasi *composite reliability* dengan mengolah nilai *composite reliability* dari indikator pengukuran konstruk dan nilai *cronbach's alpha*. Konstruk digolongkan reliabel jika nilai *composite reliability* di atas 0.7 dan nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0.6.

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai 6 variabel yang dianalisis tergolong pada reliabilitas komposit yang baik, nilai 6 variabel lebih dari 0,70 untuk *composite reliability* dan lebih dari 0,6 untuk *cronbach's alpha*. Maka analisis dilanjutkan dengan menerapkan cek *goodness of fit* model serta melakukan evaluasi dengan *inner model*.

4. Indeks Kualitas Kebijakan Pada Implementasi Pelayanan NTPD

112 Kota Probolinggo

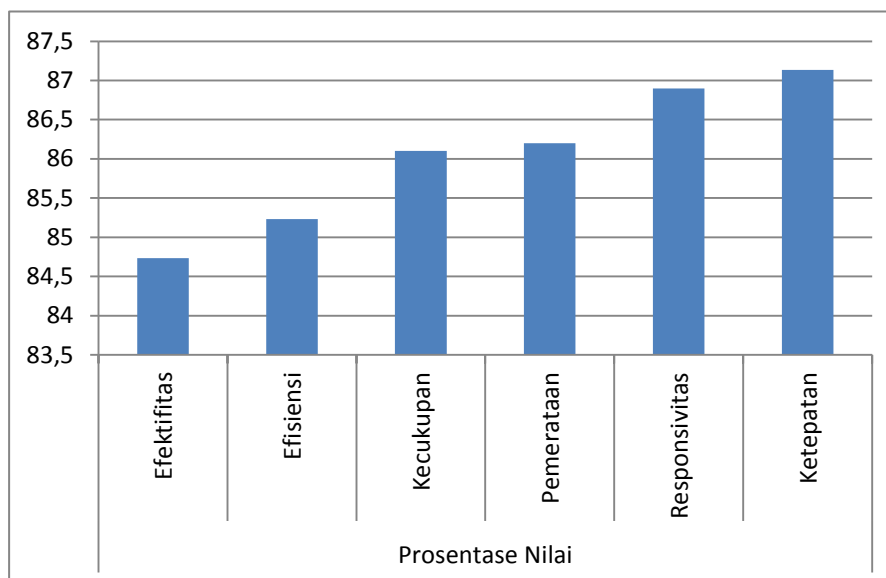
Kualitas kebijakan dapat terlihat melalui kualitas implementasi kebijakan terkait layanan sektor publik yang diselenggarakan setiap unsur. Unsur atau dimensi meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan terkait Implementasi Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo, didapatkan hasil statistik terkait analisis kualitas kebijakan terhadap kualitas implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.

Tabel 4. 22 Hasil Kuesioner dan Persentase Penilaian Setiap Unsur Pelayanan NTPD 112 Kota Probolinggo

No	Unsur	Rata-Rata	Persentase Penilaian	Mutu Pelayanan	Keterangan
1.	Efektivitas	25,42	84,73	B	Baik
2.	Efisiensi	25,57	85,23	B	Baik
3.	Kecukupan	25,83	86,1	B	Baik
4.	Pemerataan	25,86	86,2	B	Baik
5.	Responsivitas	26,07	86,9	B	Baik
6.	Ketepatan	26,14	87,13	B	Baik
	Bobot	99,99	=1		
	Unsur	10			
	Bobot NRR Tertimbang	0,0			
	n Responden	100			

Sumber: Nurul Jannah Lailatul Fitria (2023)

Gambar 4. 12 Grafik Persentase Penilaian setiap Unsur Pelayanan



Sumber : Nurul Jannah Lailatul Fitria (2021)

Guna mendapatkan nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menggunakan rumus seperti berikut:

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Implementasi) = <i>Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang</i>
--

Keterangan :

Nilai persepsi setiap unsur = Nilai atas jawaban responden pada 6 unsur

Nilai penimbang = bobot nilai rata-rata tertimbang (10)

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kualitas kebijakan pada implementasi, total nilai masing-masing unit layanan didapatkan dari total nilai rerata masing-masing unsur layanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) digunakan masing-masing unit layanan sebagai total nilai rerata masing-masing unsur layanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yakni dengan nilai 10.

Maka, dalam mendapatkan nilai indeks unit layanan dengan menghitung sebagai berikut:

$$8,473 + 8,523 + 8,61 + 8,62 + 8,69 + 8,713 = \text{Nilai Indeks adalah } \mathbf{8,473}.$$

$$\text{Indeks Kualitas Kebijakan : } 8,473 \times 10 = \mathbf{84.73}$$

Tabel 4. 23 Nilai Persepsi, Interval Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

No	Nilai Interval IKK	Mutu Kebijakan	Kualitas unit Kebijakan
1.	>90	A	Sangat Baik
2.	81-89,99	B	Baik
3.	71 – 80,99	C	Sedang
4.	60 – 70,99	D	Cukup
5.	<59,99	E	Kurang

Sumber : (Lembaga Administrasi Negara, 2018)

Hasil nilai indeks unit layanan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai IKK pasca konversi = Nilai Indeks \times Nilai Dasar
 $= 8,473 \times 10 = \mathbf{84,73}$
- b. Mutu pelayanan yang diberikan bernilai **B**.
- c. Kinerja pada unit layanan ada pada kriteria **Baik**.

Berdasarkan kategorisasi mutu kualitas kebijakan di atas, maka kualitas kebijakan pada implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo memperoleh hasil konversi IKK sebesar 84,73. Implementasi unit layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo berada dalam mutu kualitas kebijakan pada “B” dengan kategori “Baik”.

5. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kualitas kebijakan dalam implementasi pelayanan nomor tunggal darurat 112 Kota Probolinggo, berdasarkan penilaian masyarakat. Hasil riset memaparkan bahwa Kinerja unit layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo tergolong pada mutu pelayanan “**B**” dengan kategori “**Baik**”. Hal ini ditunjukkan pada nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan 6 (enam) unsur IKK pada implementasi pelayanan sebesar 8,473 serta nilai konversi IKK sejumlah 84,73. Indikator dengan nilai IKK paling tinggi merupakan implementasi pada unsur ketepatan dengan nilai IKK sebesar 8,713 dengan nilai konversi IKK sejumlah 87,13. Selanjutnya pada indikator yang mendapatkan nilai IKK terendah merupakan implementasi pada unsur efektivitas mendapatkan nilai IKK sebesar 8,473 dan nilai konversi IKK sejumlah 84,73.

Sesuai dengan data riset yang telah dilakukan analisis, maka perihal pembahasan hasil riset pada setiap indikator Indeks Kualitas Kebijakan sebagai berikut:

- a. Efektivitas,
- b. Efisiensi,
- c. Kecukupan,
- d. Pemerataan,
- e. Responsivitas, dan
- f. Ketepatan.

Pembahasan secara detail setiap indikator sebagai berikut:

a. Efektivitas Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo

Efektivitas implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Mencakup tiga hal pokok, yaitu rasionalitas teknis, pencapaian tujuan dan nilai pelayanan. Instansi bertugas pada jasanya dengan tepat sesuai dengan rasionalitas teknis. Serta instansi memberikan pelayanan relevan dengan mencapai tujuan yang dikehendaki. Selain itu juga berarti bahwa instansi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan nilai-nilai penanganan yang ada.

Pada pengolahan data kuesioner didapatkan tiga item jawaban dari pertanyaan terkait efektivitas dalam rasionalitas teknis, pencapaian tujuan dan nilai pelayanan. Pada item efektivitas rasionalitas teknis didapatkan total perhitungan sebesar 823. Nilai akhir pada item rasionalitas teknis didapatkan data sebesar 8,23. Hasil sementara menunjukkan variabel efektivitas pada rasionalitas teknis tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Pada item efektivitas pencapaian tujuan didapatkan total perhitungan sebesar 836. Nilai akhir pada item pencapaian tujuan didapatkan data sebesar 8,36. Hasil sementara menunjukkan variabel efektivitas pada pencapaian tujuan tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Sedangkan pada item efektivitas nilai pelayanan didapatkan total perhitungan sebesar 883. Nilai akhir pada item nilai pelayanan didapatkan data sebesar 8,83. Hasil sementara menunjukkan variabel efektivitas pada nilai pelayanan tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Hasil perhitungan dari ketiga item menunjukkan kesamaan kategori baik atau B. Nilai tertinggi pada efektivitas nilai pelayanan dengan nilai pengukuran sebesar 8,83 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi kedua pada efektivitas pencapaian tujuan dengan nilai pengukuran sebesar 8,36 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi ketiga pada efektivitas rasionalitas teknis dengan nilai pengukuran sebesar 8,23 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**.

Nilai keseluruhan variabel efektivitas didapatkan dari tiga item efektivitas yakni item rasionalitas teknis, pencapaian tujuan dan nilai pelayanan. Nilai keseluruhan adalah hasil penjumlahan dari 8,23; 8,36; dan 8,83. Didapatkan jumlah sebesar 25,42. Langkah selanjutnya ditarik rerata dari total ketiga item, sehingga didapatkan total 8,473.

Hasil riset memaparkan hipotesis H_0 : Variabel Kualitas Pelayanan Efektivitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan "**ditolak**", sedangkan H_a : Variabel Kualitas Pelayanan Efektivitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan "**diterima**". Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada

implementasi layanan untuk efektivitas sebesar 8,473 dengan nilai konversi IKK sebesar 84,73.

Pada hasil riset bahwa efektivitas layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo memiliki mutu pelayanan “**B**” dengan kategori “**Baik**”. Masyarakat merasa konsistensi kerja sesuai dengan rasionalitas teknis, pencapaian tujuan dan nilai pelayanan dalam implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo sudah baik. Maka perlu usaha dalam peningkatan efektivitas layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.

b. Efisiensi Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo

Efisiensi implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dijabarkan dengan rasionalitas ekonomi, pengoptimalan sumber daya, dan pengoptimalan sarana prasarana. Hal ini berarti instansi bertugas pada jasanya dengan rasionalitas ekonomi. Serta instansi memberikan pelayanan dengan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya. Instansi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan pengoptimalan sarana prasarana.

Pada pengolahan data kuesioner didapatkan tiga item jawaban dari pertanyaan terkait efisiensi dalam rasionalitas ekonomi, pengoptimalan sumber daya dan pengoptimalan sarana prasarana. Pada item efisiensi

rasionalitas ekonomi didapatkan total perhitungan sebesar 862. Nilai akhir pada item pengoptimalan sumber daya didapatkan data sebesar 8,62. Hasil sementara menunjukkan variabel efisiensi pada rasionalitas ekonomi tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Pada item efisiensi pengoptimalan sumber daya didapatkan total perhitungan sebesar 800. Nilai akhir pada item pengoptimalan sumber daya didapatkan data sebesar 8. Hasil sementara menunjukkan variabel efisiensi pada pengoptimalan sumber daya tergolong dalam kategori **sedang** atau **C**.

Sedangkan pada item efisiensi pengoptimalan sarana prasarana didapatkan total perhitungan sebesar 895. Nilai akhir pada item pengoptimalan sarana prasarana didapatkan data sebesar 8,95. Hasil sementara menunjukkan variabel efisiensi pada pengoptimalan sarana prasarana tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Hasil perhitungan dari ketiga item menunjukkan perbedaan kategori baik atau B dan sedang atau C. Nilai tertinggi pada efisiensi pengoptimalan sarana prasarana dengan nilai pengukuran sebesar 8,95 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi kedua, pada rasionalitas ekonomi dengan nilai pengukuran sebesar 8,62 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Sebenarnya nilai pada pengoptimalan sumber daya dalam penanganan tidak jauh berbeda dengan nilai efisiensi rasionalitas ekonomi dan pengoptimalan sarana prasarana. Nilai pengukuran pada efisiensi pengoptimalan sumber daya

dalam penanganan sebesar 8 dan tergolong pada Kategori **sedang** atau **C**.

Nilai keseluruhan variabel efisiensi didapatkan dari tiga item efisiensi yakni item rasionalitas ekonomi, pengoptimalan sumber daya dan pengoptimalan sarana prasarana. Nilai keseluruhan adalah hasil penjumlahan dari 8,62; 8; dan 8,95. Didapatkannya jumlah sebesar 25,57. Langkah selanjutnya ditarik rerata dari total kedua item, sehingga didapatkan total 8,523.

Hasil riset memaparkan hipotesis H_02 : Variabel Kualitas Pelayanan efisiensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan “**ditolak**”, sedangkan H_a2 : Variabel Kualitas Pelayanan efisiensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan “**diterima**”. Maka nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada efisiensi sejumlah 8,523 dengan nilai konversi IKK sejumlah 85,23.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa efisiensi implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo memiliki mutu pelayanan “**B**” dengan kategori “**Baik**”. Masyarakat merasa pelayanan mengoptimalkan rasionalitas ekonomi, sumber daya dan sarana prasarana untuk memberikan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo sudah baik. Maka perlu usaha dalam

peningkatan efisiensi implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.

c. Kecukupan Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo

Kecukupan implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dijabarkan dengan kepuasan kebutuhan, kecukupan kinerja aparatur, dan nilai penanganan oleh masyarakat dalam pelayanan. Instansi bertugas pada jasa dengan mengorientasikan pada kepuasan kebutuhan masyarakat. Serta instansi memberikan jasanya dengan mengorientasikan pada kinerja aparatur. Selain itu juga Instansi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan memperhatikan penilaian masyarakat dalam penanganan.

Pada pengolahan data kuesioner didapatkan tiga item jawaban dari pertanyaan terkait kecukupan dalam kepuasan kebutuhan, kinerja aparatur, dan penilaian masyarakat dalam penanganan. Pada item kecukupan kepuasan kebutuhan didapatkan total perhitungan sebesar 847. Nilai akhir pada item kepuasan kebutuhan didapatkan data sebesar 8,47. Hasil sementara menunjukkan variabel kecukupan pada kepuasan kebutuhan tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Pada item kecukupan kinerja aparatur didapatkan total perhitungan sebesar 829. Nilai akhir pada item kinerja aparatur didapatkan data

sebesar 8,29. Hasil sementara menunjukkan variabel kecukupan pada kinerja aparatur tergolong dengan kategori **baik** atau **B**.

Pada item kecukupan penilaian masyarakat terkait penanganan didapatkan total perhitungan sebesar 907. Nilai akhir pada item penilaian masyarakat dalam penanganan didapatkan data sebesar 9,07. Hasil sementara menunjukkan variabel kecukupan pada penilaian masyarakat dalam penanganan tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Hasil perhitungan dari ketiga item menunjukkan kesamaan kategori baik atau B. Nilai tertinggi pada kecukupan nilai penanganan dengan nilai pengukuran sebesar 9,07 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi kedua pada kecukupan kepuasan dengan nilai pengukuran sebesar 8,47 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi ketiga pada kecukupan kinerja aparatur dengan nilai pengukuran sebesar 8,29 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**.

Nilai keseluruhan variabel efisiensi didapatkan dari tiga item kecukupan yakni item kepuasan kebutuhan, kinerja aparatur, dan item penilaian masyarakat dalam penanganan. Nilai keseluruhan adalah hasil penjumlahan dari 8,47; 8,29; dan 9,07. Didapatkan jumlah sebesar 25,83. Langkah selanjutnya ditarik rerata dari total kedua item, sehingga didapatkan total 8,61.

Hasil riset memaparkan hipotesis H_03 : Variabel Kualitas Pelayanan kecukupan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan “**ditolak**”, sedangkan H_a3 :

Variabel Kualitas Pelayanan kecukupan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan “**diterima**”. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) untuk kecukupan sejumlah 8,61 dengan nilai konversi IKK sejumlah 86,1.

Hasil riset memaparkan kecukupan implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo memiliki mutu pelayanan “**B**” dengan kategori “**Baik**”. Masyarakat merasa pelayanan mencapai kepuasan kebutuhan, kinerja aparatur, dan penilaian masyarakat dalam penanganan guna bertugas pada jasa yang diperlukan masyarakat dalam implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo sudah baik. Maka perlu usaha dalam peningkatan kecukupan implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.

d. Pemerataan Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo

Pemerataan implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dijabarkan dengan rasionalitas legal, rasionalitas sosial, dan keadilan sosial dalam penanganan. Instansi bertugas pada jasanya dengan mengutamakan pada rasionalitas legal. Serta instansi memberikan jasanya dengan mengutamakan pada rasionalitas sosial. Instansi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan mengedepankan keadilan sosial dalam penanganan.

Pada pengolahan data kuesioner didapatkan tiga item jawaban dari pertanyaan terkait pemerataan dalam rasionalitas legal, rasionalitas sosial, dan keadilan sosial dalam penanganan. Pada item pemerataan dalam rasionalitas legal didapatkan total perhitungan sebesar 826. Nilai akhir pada item rasionalitas legal didapatkan data sebesar 8,26. Hasil sementara menunjukkan variabel pemerataan pada rasionalitas legal tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Pada item pemerataan dalam rasionalitas sosial didapatkan total perhitungan sebesar 841. Nilai akhir pada item rasionalitas sosial didapatkan data sebesar 8,41. Hasil sementara menunjukkan variabel pemerataan pada rasionalitas sosial tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Sedangkan pada item pemerataan keadilan sosial dalam penanganan didapatkan total perhitungan sebesar 919. Nilai akhir pada item pemerataan keadilan sosial dalam penanganan didapatkan data sebesar 9,19. Hasil sementara menunjukkan variabel pemerataan pada pemerataan keadilan sosial dalam penanganan tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Hasil perhitungan dari ketiga item menunjukkan kesamaan kategori baik atau B. Nilai tertinggi pada pemerataan melalui keadilan sosial dengan nilai pengukuran sebesar 9,19 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi kedua pada pemerataan rasionalitas sosial dengan nilai pengukuran sebesar 8,41 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**.

Nilai tertinggi ketiga pada pemerataan rasionalitas legal dengan nilai pengukuran sebesar 8,26 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**.

Nilai keseluruhan variabel pemerataan didapatkan dari tiga item pemerataan yakni item rasionalitas legal, rasionalitas sosial, dan keadilan sosial dalam penanganan. Nilai keseluruhan adalah hasil penjumlahan dari 8,26; 8,41; dan 9,19. Didapatkan jumlah sebesar 25,86 Langkah selanjutnya ditarik rerata dari total kedua item, sehingga didapatkan total 8,62.

Hasil riset memaparkan hipotesis Ho4 : Variabel Kualitas Pelayanan pemerataan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan “**ditolak**”, sedangkan Ha4 : Variabel Kualitas Pelayanan pemerataan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan “**diterima**”. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) untuk pemerataan sejumlah 8,62 dengan nilai konversi IKK sejumlah 86,2.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa pemerataan implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo memiliki mutu pelayanan “**B**” dengan kategori “**Baik**”. Masyarakat merasa pelayanan sesuai dengan rasionalitas legal, rasionalitas sosial, dan keadilan pada masyarakat dalam penanganan guna bertugas pada jasa yang diperlukan masyarakat dalam implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo sudah baik. Maka perlu usaha dalam peningkatan

pemerataan implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.

e. Responsivitas Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo

Responsivitas implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dijabarkan atas respon aparatur, kemauan bertindak, dan kesiapan aparatur dalam penanganan. Instansi bertugas pada jasanya dengan dasar respon aparatur. Serta instansi memberikan jasanya dengan kemauan bertindak aparatur dalam penanganan. Instansi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan dasar kesiapan aparatur dalam penanganan.

Pada pengolahan data kuesioner didapatkan tiga item jawaban dari pertanyaan terkait responsivitas dalam respon aparatur, kemauan bertindak aparatur, dan kesiapan aparatur dalam penanganan. Pada item responsivitas dalam respon aparatur didapatkan total perhitungan sebesar 849. Nilai akhir pada item kemauan bertindak didapatkan data sebesar 8,49. Hasil sementara menunjukkan variabel responsivitas pada kemauan bertindak tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Pada item responsivitas dalam kemauan bertindak aparatur didapatkan total perhitungan sebesar 838. Nilai akhir pada item kemauan bertindak didapatkan data sebesar 8,38. Hasil sementara

menunjukkan variabel responsivitas pada kemauan bertindak aparatur tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Sedangkan pada item kesiapan aparatur dalam penanganan didapatkan total perhitungan sebesar 920. Nilai akhir pada item kesiapan aparatur dalam penanganan didapatkan data sebesar 9,20. Hasil sementara menunjukkan variabel responsivitas pada kesiapan aparatur dalam penanganan tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Hasil perhitungan dari ketiga item menunjukkan kesamaan kategori baik atau B. Nilai tertinggi pada responsivitas melalui kesiapan aparatur dengan nilai pengukuran sebesar 9,20 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi kedua pada responsivitas melalui respon aparatur dengan nilai pengukuran sebesar 8,49 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi ketiga pada responsivitas kemauan aparatur dengan nilai pengukuran sebesar 8,38 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**.

Nilai keseluruhan variabel responsivitas didapatkan dari tiga item responsivitas yakni item respon aparatur, kemauan bertindak aparatur, dan kesiapan aparatur dalam penanganan. Nilai keseluruhan adalah hasil penjumlahan dari 8,49; 8,38; dan 9,20. Didapatkan jumlah sebesar 26,07 Langkah selanjutnya ditarik rerata dari total kedua item, sehingga didapatkan total 8,69.

Hasil riset memaparkan hipotesis H_0 : Variabel Kualitas Pelayanan responsivitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kualitas kebijakan dinyatakan “**ditolak**”, sedangkan Ha5 : Variabel Kualitas Pelayanan responsivitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan “**diterima**”. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) atas responsivitas sejumlah 8,69 dengan nilai konversi IKK sejumlah 86,9.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa responsivitas implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo memiliki mutu pelayanan “**B**” dengan kategori “**Baik**”. Masyarakat merasa kinerja sesuai dengan respon aparatur, kemauan aparatur, dan kesiapan dalam penanganan guna bertugas pada jasa yang diperlukan masyarakat dalam implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo sudah baik. Maka perlu usaha dalam peningkatan responsivitas implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.

f. Ketepatan Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo

Ketepatan implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dijabarkan melalui tepat nilai, tepat waktu, dan tepat tindakan dalam penanganan. Instansi bertugas pada jasanya dengan pedoman ketepatan nilai dalam penanganan. Serta instansi memberikan jasanya dengan pedoman ketepatan waktu dalam

penanganan. Instansi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan pedoman ketepatan tindakan dalam penanganan.

Pada pengolahan data kuesioner didapatkan tiga item jawaban dari pertanyaan terkait ketepatan dalam nilai penanganan, tepat waktu, dan ketepatan tindakan dalam penanganan. Pada item ketepatan nilai dalam penanganan didapatkan total perhitungan sebesar 811. Nilai akhir pada item ketepatan waktu didapatkan data sebesar 8,11. Hasil sementara menunjukkan variabel ketepatan nilai dalam penanganan tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Pada item ketepatan waktu dalam penanganan didapatkan total perhitungan sebesar 870. Nilai akhir pada item ketepatan waktu didapatkan data sebesar 8,7. Hasil sementara menunjukkan variabel ketepatan waktu dalam penanganan tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Sedangkan pada item ketepatan tindakan dalam penanganan didapatkan total perhitungan sebesar 933. Nilai akhir pada item ketepatan tindakan dalam penanganan didapatkan data sebesar 9,33. Hasil sementara menunjukkan variabel ketepatan tindakan dalam penanganan tergolong dalam kategori **baik** atau **B**.

Hasil perhitungan dari ketiga item menunjukkan kesamaan kategori baik atau B. Nilai tertinggi pada ketepatan melalui tepat tindakan dengan nilai pengukuran sebesar 9,33 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi kedua pada ketepatan melalui tepat waktu dengan

nilai pengukuran sebesar 8,7 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi ketiga pada ketepatan melalui tepat nilai dengan nilai pengukuran sebesar 8,11 dan tergolong pada kategori **baik** atau **B**.

Nilai keseluruhan variabel ketepatan didapatkan dari tiga item ketepatan yakni item ketepatan nilai, ketepatan waktu, dan ketepatan tindakan dalam penanganan. Nilai keseluruhan adalah hasil penjumlahan dari 8,11; 8,7; dan 9,33. Didapatkan jumlah sebesar 26,14 Langkah selanjutnya ditarik rerata dari total kedua item, sehingga didapatkan total 8,713.

Hasil riset memaparkan hipotesis H_0 : Variabel Kualitas Pelayanan ketepatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan "**ditolak**", sedangkan H_a : Variabel Kualitas Pelayanan ketepatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dinyatakan "**diterima**". Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) atas ketepatan sejumlah 8,713 dengan nilai konversi IKK sejumlah 87,13.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa ketepatan implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo memiliki mutu pelayanan "**B**" dengan kategori "**Baik**". Masyarakat merasa kinerja sesuai dengan tepat nilai, tepat waktu, dan tepat tindakan dalam penanganan guna bertugas pada jasa yang diperlukan masyarakat dalam implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo sudah baik. Maka perlu usaha dalam peningkatan

ketepatan implementasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo.

g. Interpretasi Data Pada Keseluruhan Variabel

Pada hasil riset memaparkan nilai tertinggi pada variabel ketepatan Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Nilai diperoleh sebesar 87,13. Hal ini mengindikasikan variabel ketepatan dalam Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo tergolong pada kategori **baik** atau **B**. Nilai tertinggi kedua ada pada variabel responsivitas Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Nilai diperoleh sebesar 86,9. Hal ini mengindikasikan variabel responsivitas dalam Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo tergolong pada kategori **baik** atau **B**.

Sedangkan nilai terendah ada pada variabel efektivitas Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo. Nilai diperoleh sebesar 84,73. Hal ini mengindikasikan variabel efektivitas dalam Implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo meskipun memiliki nilai terendah tapi masih tergolong pada kategori **baik** atau **B**.

Pada intinya, seluruh variabel dengan nilai tertinggi sampai variabel dengan nilai terendah tergolong pada kategori **baik** atau **B**.

Tidak ada variabel pada kategori **baik** atau **B**. Enam variabel yang telah dilakukan perhitungan, secara keseluruhan ada pada kualitas baik. Sehingga dapat dipaparkan bahwa IKK Implementasi Dalam Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 berkualitas baik.

Sehingga, jika perolehan nilai diurutkan dari nilai tertinggi dan terendah adalah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Nilai Perhitungan Variabel NTPD 112 Kota Probolinggo

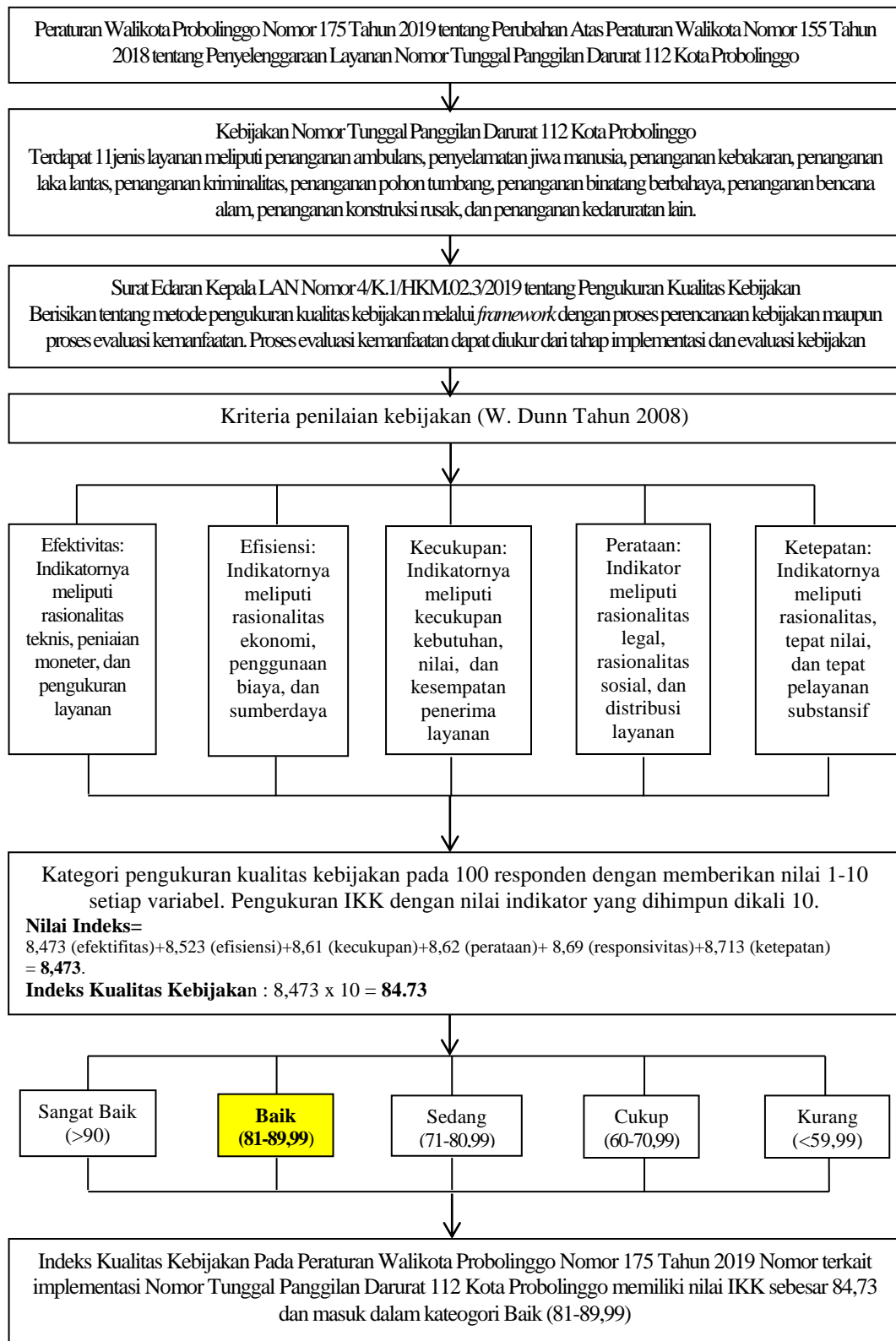
Variabel	Nilai	Mutu Pelayanan	Kategori
Ketepatan	87,13	B	Baik
Responsivitas	86,9	B	Baik
Pemerataan	86,2	B	Baik
Kecukupan	86,1	B	Baik
Efektivitas	85,23	B	Baik
Efisiensi	84,73	B	Baik

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Pada data, Peringkat pertama pada variabel ketepatan implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dengan nilai 87,13 serta berkategori baik atau B. Peringkat kedua pada variabel responsivitas implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dengan nilai 86,9 dan kategori baik atau B. Peringkat ketiga pada variabel pemerataan implementasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dengan nilai 86,2 dan kategori baik atau B. Peringkat keempat pada variabel

kecukupan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dengan nilai 86,1 dan kategori baik atau B. Peringkat kelima pada variabel efisiensi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dengan nilai 85,23 dan kategori baik atau B. Peringkat keenam pada variabel efektivitas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dengan nilai 84,73 dan kategori baik atau B.

Gambar 4. 13 Kerangka Hasil Penelitian



Sumber : Nurul Jannah Lailatul Fitria (2022)